



Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



**LKIP**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**  
**TAHUN 2016**

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Kenari No. 58 (Timoho) Yogyakarta 55165 Telp. (0274) 561215, 513422 Fax: (0274) 549225 - 562936  
website : [yogya-bkkbn.go.id](http://yogya-bkkbn.go.id) - e-mail : [yogya@bkkbn.go.id](mailto:yogya@bkkbn.go.id)

**PERWAKILAN BKKBN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



## Kata Pengantar

Laporan Kinerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Substansi yang terjadi dalam LKIP ini memuat informasi yang berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu tahun anggaran 2016 dan menyajikan informasi keberhasilan dan kurang berhasil. Seluruh informasi tersebut tersaji dalam deskripsi yang tertuang dalam analisis capaian kinerja.

Kami berharap LKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif dalam menilai kinerja dari Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus sebagai masukan dalam upaya peningkatan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta di masa mendatang.

Yogyakarta, 30 Januari 2017

Kepala Perwakilan,



Drs. Am Jomhana Mulyana, M.Si.

## **Ikhtisar Eksekutif**

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta selaku miniatur BKKBN di daerah bertindak sebagai unit pelaksana kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat, sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran strategis mengacu pada penetapan BKKBN Pusat. Sasaran program dan sasaran kegiatan yang diamanahkan kepada Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BKKBN sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) BKKBN Tahun 2015 – 2019.

Renstra tersebut memuat Visi BKKBN yaitu “Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”, dengan misi :

- a. Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan.
- b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- c. Memfasilitasi pembangunan keluarga.
- d. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.
- e. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, ditetapkan 5 sasaran strategis, yaitu :

- a. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)
- b. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (CPR) modern
- c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)
- d. Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

e. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Pada tahun 2016 ini, terdapat 5 indikator utama untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut yang meliputi : Angka prevalensi penggunaan kontrasepsi; Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi; Angka kelahiran pada usia remaja; Persentase peserta KB baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan Persentase peserta KB aktif MKJP, yang didukung 15 (lima belas) sasaran program beserta targetnya.

Pencapaian kinerja pada lima indikator tersebut empat diantaranya tercapai dengan memuaskan, melebihi target yang ditetapkan. Meskipun indikator persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*) masih dibawah target kinerja dengan pencapaian 89,89%. Namun kondisi pencapaian ini relatif lebih baik dari kondisi nasional. Sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

No	Indikator Sasaran Strategis	Target	Pencapaian	
			Absolut	Persentase
1.	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi ( <i>CPR</i> )	56,20	78,60	139,86%
2.	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>Unmetneed</i> )	7,20	8,01	89,89%
3.	Angka Kelahiran pada remaja usia 15 – 19 tahun ( <i>ASFR 15 – 19 th</i> )	29	20	145%
4.	Persentase Peserta KB Baru MKJP	34,60	44,57	128,8%
5.	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	31,70	37,82	119,3%

Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 sebagai upaya untuk menurunkan angka *unmetneed* adalah sebagai berikut :

1. Melakukan promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB;
2. Melakukan Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;
3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program KKBPK dalam tahun 2017 dan harus difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian PB rendah dan Unmeet Need yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di daerah legok;
4. Sekaitan dengan *Stock Out* alat dan obat kontrasepsi di gudang Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan identifikasi ketersediaan alokon di Kabupaten/Kota untuk dilakukan distribusi dinamis dengan mekanisme yang ada.

Selain indikator utama tersebut keberhasilan program KKBPK di Daerah Istimewa Yogyakarta juga di dukung oleh tercapainya indikator sasaran program, dengan tingkat keberhasilan yang baik. Sebagain besar sasaran program, tepatnya sembilan indikator tercapai dengan kategori baik. Bahkan terdapat dua indikator dengan pencapaian terbaik, yaitu pada indikator persentase PUS anggota UPPKS yang ber KB serta jumlah peserta KB aktif. Sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No	Indikator Sasaran Strategis	Capaian		
		2016	2015	2014
1.	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi ( <i>CPR</i> )	139,86%	126,90%	n.a
2.	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>Unmetneed</i> )	89,89%	94,43%	78,48%
3.	Angka Kelahiran pada remaja usia 15 – 19 tahun ( <i>ASFR</i> 15 – 19 tahun)	145,00%	153,30%	n.a
4.	Persentase Peserta KB Baru MKJP	128,80%	n.a	n.a
5.	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	119,30%	102,15%	107,64%

Trend pencapaian indikator kinerja jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya relatif tidak selaras. Angka persentase capaian *CPR* dan *ASFR* menunjukkan kenaikan sedangkan *unmetneed* dan peserta KB Aktif MKJP menggambarkan penurunan capaian, sedangkan persentase peserta KB baru MKJP belum terlihat trendnya karena tidak ada target pencapaian pada dua tahun sebelumnya.

Secara ringkas realisasi anggaran Perwakilan BKKBN DIY berhasil mencapai sebesar 91,89 persen yaitu dapat merealisasikan sebesar Rp. 26.544.399.276,- dari Rp. 28.888.358.000,-.



## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi.....	vi
DaftarTabel .....	vii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
C. Aspek Strategis.....	3
D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya.....	9
E. Sistematika Penyajian.....	14
Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja.....	15
A. Rencana Strategis 2015 – 2019 .....	15
B. Perjanjian Kinerja 2016.....	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	23
A. Capaian Kinerja.....	23
B. Analisis Capaian Kinerja.....	26
C. Realisasi Anggaran .....	37
Bab IV Penutup.....	38
A. Simpulan .....	38
B. Langkah-langkah ke Depan .....	40
Lampiran .....	42

## Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah Pengawai per Jenis Jabatan per 31 Desember 2016 .....	10
Tabel 2	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	11
Tabel 3	Jumlah Pegawai per Golongan per 31 Desember 2016.....	12
Tabel 4	Anggaran dan Realisasi s.d. 31 Desember 2016.....	13
Tabel 5	Aset Tetap per 31 Desember 2016 .....	13
Tabel 6	Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	17
Tabel 7	Sasaran Program BKKBN .....	18
Tabel 8	Perjanjian Kinerja Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2016.....	21
Tabel 9	Kategorisasi Indeks Capaian .....	23
Tabel 10	Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	24
Tabel 11	Pencapaian Indikator Sasaran Program .....	24
Tabel 12	Perkembangan Capaian Kinerja.....	28
Tabel 13	Rincian Realisasi Anggaran.....	37



# Bab 1 Pendahuluan

## A. Latar Belakang

Sesuai dengan arah pembangunan pemerintahan periode 2015-2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendukung pelaksanaan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Di dalam Strategi Pembangunan Nasional (Dimensi Pembangunan), BKKBN berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka BKKBN berkewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

## B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi, kedudukan, tugas, dan fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur pelaksana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

2. Tugas

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BKKBN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

- d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, penggerakan hubungan antar, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- e. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- f. Pelaksanaan tugas administrasi umum;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. Pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

### C. Aspek Strategis

#### 1. Isu Strategis

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk yang harus mendapat perhatian khusus adalah :

- a. Penguatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain :
  - (1) masih beragamnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran;
  - (2) jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga cenderung mengalami kenaikan, yaitu angka kelahiran total tahun 2007



- sebesar 1,8 (SDKI 2007) mengalami kenaikan menjadi 2,1 pada tahun 2012 (SDKI 2012);
- (3) pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum merata pada sasaran – sasaran tertentu;
  - (4) muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE tentang program KKBPB belum dipahami secara optimal;
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain:
- (1) angka pemakaian kontrasepsi cara modern belum meningkat secara signifikan, yaitu dari sebesar 54,8 persen pada tahun 2007 (SDKI 2007) menjadi sebesar 59,6 persen pada tahun 2012 (SDKI 2012) sedangkan pengetahuan tentang alat kontrasepsi sudah sangat tinggi;
  - (2) kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmetneed*) masih tinggi, yaitu sebesar 11,5 persen (SDKI 2012), angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,7 persen jika dibandingkan tahun 2007 (*Unmetneed* 6,8 persen; SDKI 2007);
  - (3) masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (*Contraceptive Prevalence Rate/CPR*) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (*unmetneed*), baik antar wilayah maupun antar tingkat pendidikan;
  - (4) kualitas pelayanan KB (*supply side*) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta

- komplikasi dan kegagalan. Selanjutnya yang berkenaan dengan ketersediaan dan distribusi alokasi di fasilitas kesehatan (faskes)/ klinik pelayanan KB (*supply chains*) juga belum sesuai standart;
- (5) jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terlayani pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan.
- c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja, antara lain :
- (1) angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun cenderung mengalami kenaikan, yaitu 24 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (SDKI 2007), meningkat menjadi 24 berdasarkan hasil SDKI 2012;
  - (2) masih banyaknya perkawinan usia muda di kabupaten tertentu;
  - (3) terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-19 tahun);
  - (4) tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi;
  - (5) pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah;

- (6) cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.
- d. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain :
- (1) pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah;
  - (2) partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah;
  - (3) kualitas hidup lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal;
  - (4) terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - (5) pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB;
  - (6) terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.
- e. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB). Penguatan landasan hukum dan penyerasian





kebijakan pembangunan bidang KKB memiliki beberapa permasalahan, antara lain :

- (1) landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB belum memadai, yaitu masih terdapat beberapa peraturan pemerintah dari UU nomor 52 tahun 2009 yang belum disusun dan ditetapkan, dan masih banyak kebijakan pembangunan sektor lain yang tidak sinergi dengan pembangunan bidang KKBPK;
  - (2) belum semua kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang KKBPK dimasukan dalam perencanaan daerah;
  - (3) koordinasi pembangunan bidang KKBPK dengan program pembangunan lainnya masih lemah (antara lain; koordinasi dengan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan/PKH, Jamkesmas/Jamkesda, Jampersal, PNPM, dan SJSN Kesehatan), serta penanganan kebijakan pembangunan bidang KKBPK selama ini masih bersifat parsial.
- f. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS. Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS. Data Sektoral memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang KKB. Namun, data sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB, dan keluarga belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang berkualitas.

Beberapa permasalahan di atas memberikan informasi yang cukup mendalam tentang pencapaian Program KKBPK secara nasional, dan harus dijadikan fokus dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam Renstra BKKBN 2015-2019

## 2. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada RPJMN 2015-2019 yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan adalah :

- a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB;
- c. Peningkatan pelayanan KB dengan menggunakan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE);
- d. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan KB;

- e. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB;
- f. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;
- g. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;
- h. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB;
- i. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK.

#### **D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya**

##### **1. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi, adalah Perwakilan BKKBN Provinsi Tipe A yang berkedudukan di



Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan, yang dalam pelaksanaan tugasnya membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengendalian Penduduk;
- c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- e. Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi;
- f. Bidang Pelatihan dan Pengembangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tersedia per 31 Desember 2016 sebanyak 110 orang, berdasarkan jenis jabatannya dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Jumlah Pegawai per Jenis Jabatan per 31 Desember 2016**

Jenis Jabatan	Jumlah Orang	
	2016	2015
Struktural	27	22
Fungsional Widyaiswara	7	8
Fungsional Auditor	4	4
Fungsional Arsiparis	2	2
Fungsional Peneliti	1	1
Fungsional Auditor Kepegawaian	1	1
Fungsional Umum	68	74
<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>112</b>

Sumber data : Subbag. Kepegawaian dan Hukum

Dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2015 sebanyak 112 orang, jumlah pegawai per 31 Desember 2016 berkurang sebanyak 2 orang karena adanya pegawai yang purna tugas sebanyak 4 (empat) orang dan terdapat pegawai mutasi ke Perwakilan BKKBN DIY sebanyak 2 (dua) orang.

Berdasarkan jenjang pendidikan, dari jumlah pegawai tersebut dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Jenjang Pendidikan	Jumlah Orang	
	2016	2015
Pasca Sarjana (S2)	27	24
Sarjana/Diploma IV	42	45
Diploma III	5	6
SLTA	32	33
SLTP	2	2
SD	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>112</b>

Sumber data : Subbag. Kepegawaian dan Hukum

Beberapa pegawai mengalami peningkatan pendidikan dari jenjang S1/DIV ke S2 sebanyak 3 orang meliputi lulus tugas belajar sebanyak 1 orang dan tambahan mutasi masuk yang sudah berpendidikan S2 sebanyak 2 orang. Sehingga untuk pendidikan S1/DIV mengalami penurunan dari 45 menjadi 42.

Berdasarkan golongan pegawai dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Jumlah Pegawai per Golongan per 31 Desember 2016**

Golongan	Jumlah Orang	
	2016	2015
IV.d	1	1
IV.c	1	1
IV.b	3	3
IV.a	10	9
III.d	19	20
III.c	15	14
III.b	36	38
III.a	10	11
II.d	6	6
II.c	4	4
II.b	2	2
II.a	3	2
I.d	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>112</b>

Sumber data : Subbag. Kepegawaian dan Hukum

### 3. Sumber Daya Keuangan

Pelaksanaan kegiatan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2016 dibiayai dari DIPA Tahun 2016. Jumlah anggaran selama tahun 2016 seluruhnya sebesar Rp. 28.888.358.000,- dengan realisasi mencapai Rp. 26.544.399.276,- atau 91,89% dari anggaran. Rincian anggaran dan realisasi keuangan tersebut nampak dalam tabel berikut :

**Tabel 4**  
**Anggaran dan Realisasi s.d. 31 Desember 2016**

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
DIPA	Rp. 28.888.358.000,-	Rp. 26.544.399.276,-	91,89

Sumber data : Subbag. Keuangan dan BMN

#### 4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Aset Tetap per 31 Desember 2016**

No	Uraian	Per 31 Des 2016 (Rp)	Per 31 Des 2015 (Rp)	% Naik/ (Turun)
1	Tanah	15.037.459.000	15.037.459.000	0
2	Peralatan dan Mesin	6.999.643.526	7.115.957.868	(1,63)
3	Gedung dan Bangunan	4.884.974.025	4.884.974.025	0
4	Aset tetap lainnya	21.072.300	48.822.300	(56,83)
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	203.467.200	163.626.000	24,34
6	Akumulasi Penyusutan	(6.487.456.740)	(6.219.460.239)	4,30
<b>Jumlah</b>		<b>20.659.159.311</b>	<b>21.031.378.954</b>	<b>(1,76)</b>

Sumber data : Subbag. Keuangan dan BMN



## **E. Sistematika Penyajian**

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 menjelaskan pencapaian kinerja selama tahun 2016 dengan berbagai keberhasilan maupun hambatannya, terdiri dari empat bab, yaitu :

### **Bab I Pendahuluan**

Memuat informasi tentang latar belakang penyusunan LKIP, kedudukan, tugas dan fungsi, aspek strategis, dan struktur organisasi dan sumber daya.

### **Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja**

Memuat informasi tentang Rencana Strategis tahun 2015 - 2019 dan perjanjian kinerja. Dalam uraian tentang rencana strategis dijelaskan tentang pernyataan visi, misi, tujuan strategis, indikator kinerja utama, program dan kegiatan, dan perjanjian kinerja.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Berisi penjelasan pencapaian kinerja tahun 2016 beserta realisasi anggaran serta perbandingan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2014 dan 2015.

### **Bab IV Penutup**

Menguraikan rangkuman capaian sasaran program dan rencana tindak lanjut atau langkah strategis yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun 2017.

### **Lampiran**

Berisi data dukung atas penjelasan dalam laporan ini



## Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja

Sebagai salah satu unit kerja BKKBN yang berada di daerah, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan program-program yang ditetapkan oleh BKKBN. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta selaku miniatur BKKBN di daerah bertindak sebagai unit pelaksana kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat, sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran strategis mengacu pada penetapan BKKBN Pusat. Sasaran program dan sasaran kegiatan yang diamanahkan kepada Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BKKBN.

### A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Penyusunan Rencana Strategis BKKBN merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra K/L merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah.

Gambaran singkat Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

#### 1. Visi dan Misi BKKBN

Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Untuk itu, BKKBN berkomitmen turut mensukseskan prioritas pembangunan nasional di dalam RPJPN dan agenda prioritas nomor 5 di dalam Nawa Cita melalui:

Visi :

“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.”

Misi :

- a. Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan.
- b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- c. Memfasilitasi pembangunan keluarga.
- d. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.
- e. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

#### 2. Tujuan BKKBN

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi diatas maka dirumuskan Tujuan BKKBN untuk “Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”



### 3. Sasaran Startegis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015 – 2019, yaitu :

- a. Menurunnya Angka Kelahiran Total (*TFR*)
- b. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (*CPR*) modern
- c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*)
- d. Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- e. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015 – 2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 6  
Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Indikator	Baseline Target 2014	Target Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,60	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28
2	Persentase pemakaian kontrasepsi (modern Contraceptive Prevalence Rate/CPR)	57,9	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed) (%)	11,4	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91
4	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	18,3	20,50	21,19	21,70	22,30	23,50
5	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27,1	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6

Sumber Data : Renstra BKKBN Tahun 2015-2019

### 4. Sasaran Program BKKBN

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019, BKKBN mempunyai 1 (satu) program teknis, yaitu Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga



serta 3 (tiga) program generik, yaitu 1). Program pelatihan, penelitian dan pengembangan serta kerja sama internasional BKKBN; 2). Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; 3). Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BKKBN.

**Tabel 7**  
**Sasaran Program BKKBN**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	
1.	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1.	Jumlah Peserta KB Baru (PB)
		2.	ASFR 15 – 19 Tahun
		3.	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern
		4.	Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga
		5.	Indeks pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana
		6.	Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan
		7.	Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (Pendataan Keluarga) yang akurat dan tepat waktu
2.	Program pelatihan, penelitian dan pengembangan serta kerja sama internasional BKKBN	1.	Persentase peningkatan kualitas SDM aparatur dan tenaga fungsional
		2.	Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		3. Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK 4. Indeks kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan 5. Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di provinsi
3.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB 2. Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK 3. Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja 4. Persentase terlaksananya pengembangan karir ASN yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap) 5. Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		6. Jumlah dukungan manajemen pengelolaan program kependudukan, KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga di provinsi
4.	Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BKKBN	1. Persentase temuan penyimpangan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan program KKBPk oleh eksternal audit
		2. Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN Provinsi

Sumber data : Renstra BKKBN Tahun 2015 – 2019

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian kinerja dimanfaatkan pimpinan BKKBN untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, sebagai dasar melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah, dan menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Perjanjian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 memuat sasaran strategis dan sasaran program.

Dokumen Penetapan Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 memuat lima indikator sasaran strategis dan lima belas indikator program yang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Perjanjian Kinerja Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2016**

No	Indikator Kinerja	Sasaran
A.	SASARAN STRATEGIS	
1.	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi (CPR)	56,2
2.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	7,2
3.	Angka Kelahiran pada remaja usia 15 – 19 tahun (ASFR 15-19)	29
4.	Persentase peserta KB baru MKJP	34,6
5.	Persentase peserta KB aktif MKJP	31,7
B.	SASARAN PROGRAM	
1.	Jumlah peserta KB baru (PB)	75.400
2.	Jumlah peserta KB aktif (PA)	363.090
3.	Persentase kesertaan KB Pria (PA) (MOP+Kondom)	9,3
4.	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi modern	22,6
5.	Persentase PUS anggota poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS yang ber-KB :	
a.	Persentase PUS anggota BKB yang ber-KB	86,9
b.	Persentase PUS anggota BKR yang ber-KB	82,7
c.	Persentase PUS anggota BKL yang ber-KB	76,1
d.	Persentase PUS anggota UPPKS yang ber-KB	69,1
6.	Indeks pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)	62,8
7.	Persentase sasaran yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi	10,0
8.	Persentase masyarakat yang mengetahui isu	48,0



No	Indikator Kinerja	Sasaran
	kependudukan	
9.	Persentase provinsi yang memasukan program KKBPK dalam Musrenbang	100,0
10.	Persentase kab/kota yang memasukan program KKBPK dalam Musrenbang	40,0
11.	Laporan realisasi triwulanan kab/kota penerima DAK tahun 2016	100,0
12.	Jumlah ketersediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu	100,0
13.	Laporan keuangan dan pengelolaan BMN yang dapat diselesaikan tepat waktu, akuntabel, kredibel dan memenuhi standar kepatutan	100,0
14.	Persentase temuan eksternal dan internal yang selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	100,0
15.	Pemetaan urusan bidang pengendalian penduduk dan KB di kab/kota dalam penguatan program KKBPK	100,0

Sumber data : Kontrak Kinerja Provinsi Tahun 2016



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

### A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi / pencapaian dengan target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) Tahun 2016. Perwakilan BKKBN DIY telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis BKKBN Pusat. Dalam KKP Tahun 2016 terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang didukung oleh 15 (lima belas) sasaran program beserta targetnya.

Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian. Penghitungan indeks capaian perlu memperhitungkan kategorisasi capaian. Ketentuan penetapan kategorisasi indeks capaian adalah sebagai berikut :

Tabel 9

Kategorisasi Indeks Capaian

No	Interval Capaian	Kategori Capaian	Kode Capaian
1	$\geq 100 \%$	Baik	HIAU
2	$80 \% < 100 \%$	Cukup	KUNING
3	$\leq 80 \%$	Kurang	MERAH

Hasil pengukuran terhadap pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2016 seperti yang ada dalam tabel berikut :

**Tabel 10**  
**Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2016**

No	Indikator Sasaran Strategis	Target	Pencapaian	
			Absolut	Persentase
1.	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi (CPR)	56,20	78,60	139,86%
2.	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	7,20	8,01	89,89%
3.	Angka Kelahiran pada remaja usia 15 – 19 tahun (ASFR 15 – 19 th)	29	20	145%
4.	Persentase Peserta KB Baru MKJP	34,60	44,57	128,8%
5.	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	31,70	37,82	119,3%

Sumber Data : Statistik Rutin dan Susenas 2015

Capaian Indikator Sasaran Strategis tersebut juga didukung oleh capaian sasaran program tahun 2016, meskipun belum semua sasaran program dapat tercapai dengan baik, namun berkontribusi terhadap capaian sasaran strategis. Capaian indikator sasaran program tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 11**  
**Pencapaian Indikator Sasaran Program**

No	Indikator Sasaran Program	Target	Pencapaian	
			Absolut	Persentase
1.	Jumlah peserta KB baru (PB)	75.400	45.818	60,77%
2.	Jumlah peserta KB aktif (PA)	363.090	431.813	118,93%
3.	Persentase kesertaan KB Pria (PA) (MOP+Kondom)	9,3	7,62	81,94%

No	Indikator Sasaran Program	Target	Pencapaian	
			Absolut	Persentase
4.	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi modern	22,6	11	48,67%
5.	Persentase PUS anggota poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS yang ber-KB :			
	a. Persentase PUS anggota BKB yang ber-KB	86,9	88,15	101,44%
	b. Persentase PUS anggota BKR yang ber-KB	82,7	87,27	105,53%
	c. Persentase PUS anggota BKL yang ber-KB	76,1	84,34	110,83%
	d. Persentase PUS anggota UPPKS yang ber-KB	69,1	88,03	127,39%
6	Indeks pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)	62,8	65	103,50%
7	Persentase sasaran yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi	10,0	10,8	100,80%
8	Persentase masyarakat yang mengetahui isu kependudukan	48,0	50,2	104,60%
9	Persentase provinsi yang memasukan program KKBPK dalam Musrenbang	100,0	100,0	100%
10	Persentase kab/kota yang memasukan program KKBPK dalam Musrenbang	40,0	100,0	250%
11	Laporan realisasi triwulanan kab/kota penerima DAK 2016	100,0	100,0	100%
12	Jumlah ketersediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu	100,0	93,4	93,4%



No	Indikator Sasaran Program	Target	Pencapaian	
			Absolut	Persentase
13	Laporan keuangan dan pengelolaan BMN yang dapat diselesaikan tepat waktu, akuntabel, kredibel dan memenuhi standar kepatutan	100,0	100,0	100%
14	Persentase temuan eksternal dan internal yang selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	100,0	80,0	80%
15	Pemetaan urusan bidang pengendalian penduduk dan KB di kab/kota dalam penguatan program KKBPK	100,0	100,0	100%

Sumber Data : Statistik Rutin, Susenas, Survey RPJM

## B. Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi (*CPR*)

Pada indikator Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi (*CPR*) di DIY tercapai sebesar 139,86% dari target *CPR* yang ditetapkan dalam KKP Tahun 2016 sebesar 56,20%. Sesuai Data Statistik Rutin BKKBN, tingkat penggunaan kontrasepsi (*CPR*) tahun 2016 tercapai sebesar 78,60% dari seluruh PUS yang ada.

### 2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmetneed*)

Pada tahun 2016 berdasarkan data Statistik Rutin BKKBN, Persentase *Unmetneed* di DIY tercapai sebesar 8,01%. Angka tersebut berarti untuk *unmetneed* hanya tercapai sebesar 89,89% dari target dalam KKP yang ditetapkan sebesar 7,20%.

3. Angka Kelahiran pada remaja usia 15 – 19 tahun (*ASFR* 15 – 19)  
Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2015 *ASFR* (15-19 tahun) di DIY tercapai sebanyak 20 orang untuk setiap 1.000 WUS usia 15-19 tahun. Hal tersebut berarti dari 1.000 orang WUS usia 15-19 tahun terdapat 20 orang remaja pada usia tersebut yang sudah pernah melahirkan. Angka *ASFR* (15-19 tahun) tersebut lebih rendah dari target yang telah ditetapkan dalam KKP yaitu sebanyak 29 orang, sehingga untuk *ASFR* (15-19 tahun) tercapai sebesar 145%.
4. Persentase Peserta KB Baru MKJP  
Data pencapaian peserta KB Baru MKJP diperoleh dari Statistik Rutin BKKBN tahun 2016. Persentase peserta KB Baru MKJP di DIY tercapai sebesar 44,57% capain tersebut melebihi dari target yang ditetapkan dalam KKP sebesar 34,6%. Artinya pada indikator tersebut tercapai sebesar 128,81%.
5. Persentase Peserta KB Aktif MKJP  
Peserta KB Aktif menurut data Statistik Rutin tahun 2016 tercapai sebesar 37,82%, capaian itu melampaui dari target KKP yang ditetapkan 31,7%. Dibandingkan dengan KKP, capaian tersebut mencapai 119,3%.



Sedangkan perkembangan capaian kinerja program KKBPK pada Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2015 dan Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 12**  
**Perkembangan Capaian Kinerja**

No	Indikator Sasaran Strategis	Capaian		
		2016	2015	2014
1.	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi ( <i>CPR</i> )	139,86%	126,90%	n.a
2.	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>Unmetneed</i> )	89,89%	94,43%	78,48%
3.	Angka Kelahiran pada remaja usia 15 – 19 tahun ( <i>ASFR</i> 15 – 19 tahun)	145,00%	153,30%	n.a
4.	Persentase Peserta KB Baru MKJP	128,80%	n.a	n.a
5.	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	119,30%	102,15%	107,64%

Sumber Data : Statistik Rutin, Susenas, Survey RPJM

Pada capaian angka prevalensi penggunaan kontrasepsi baru, pada tahun 2015 *CPR* tercapai sebanyak 126,90% dari target dan meningkat persentase pencapaiannya di tahun 2016 menjadi 139,86%. Persentase penggunaan ber-KB yang tidak terpenuhi dibandingkan dengan target kinerja di tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 (dari 78,48% menjadi 94,43%). Namun di tahun 2016 persentase pencapaian *unmetneed* terhadap KKP mengalami penurunan sebanyak 4,54% menjadi 89,89%. Naiknya angka *unmetneed* antara lain disebabkan oleh terjadinya *Stock Out* alkon IUD sehingga calon akseptor yang ingin mendapatkan pelayanan IUD menjadi tidak terlayani.

Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun juga menjadi salah satu target yang harus diturunkan di tahun 2015-2016. Kondisi saat ini di D.I. Yogyakarta angka *ASFR* (15-19) telah mencapai target kinerja yang diinginkan terbukti dari pencapaian yang melebihi 100% walaupun terdapat penurunan secara persentase capaian terhadap target kinerja yaitu dari 153,30% di 2015 menjadi 145,00% di 2016. Namun penurunan pencapaian target tersebut juga dipengaruhi oleh terjadinya perubahan target kinerja dimana pada tahun 2015 sebesar 30,7/1000 WUS menjadi 29/1000 WUS di tahun 2016, sementara data yang digunakan untuk penghitungan capaian masih dari sumber dan tahun yang sama.

Tingkat kesertaan KB Aktif MKJP dalam 3 tahun terakhir menunjukkan capaian yang membanggakan karena target kinerja dapat tercapai selama tiga tahun berturut-turut. Jika dilihat trennya, capaian PA MKJP terhadap KKP mengalami fluktuasi dan memiliki kecenderungan meningkat dengan capaian 119,3% ditahun 2016.

Tercapainya target kinerja di tahun 2016 tersebut didukung oleh berbagai kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Perwakilan BKKBN DIY. Kebijakan dan strategi tersebut antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan KB melalui *MoU* pelayanan KB dengan Rumah sakit yang memberikan pelayanan KB ( RS. Besthesda, RS. Griya Mahardika, RS. Dinas Kesehatan Tentara Dr. Soetarto), pemberian KIE Kesehatan reproduksi pada ANC, penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai di setiap faskes KB.





2. Peningkatan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan KKBPK melalui program Genre, Jambore kependudukan, KKN tematik kependudukan.
3. Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis dan pelayanan KB melalui Bhaksos
4. Peningkatan kualitas kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) melalui seleksi penilaian kader maupun kelompok kegiatan, pelatihan bagi kader kelompok kegiatan, pemberian dukungan operasional serta sarana dan prasarana.
5. Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Program KKBPK melalui fasilitasi materi informasi dan KIE below the line dan penggerakan MUPEN dalam penyampaian informasi kepada masyarakat
6. Peningkatan kemitraan dengan stakeholder dan mitra kerja dalam penggarapan Program KKBPK melalui sinergitas kegiatan antara lain pembentukan Kampung KB di seluruh Kab/Kota, integrasi kegiatan dengan mitra TNI, PKK dan Dinas Kesehatan, Peningkatan koordinasi dengan mitra kerja terkait IBI, IpeKB, IPKB, IDI, Aisyiyah, Fatayat NU, Muslimat NU, Fapsedu dll, penandatanganan MoU dengan Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (HARPI) dalam penyampaian materi program KKBPK kepada calon pengantin.
7. Optimalisasi tenaga lini lapangan untuk peningkatan penggerakkan Program KKBPK di lini lapangan melalui fasilitasi pertemuan kemitraan secara berjenjang melalui rakor desa/trikomponen, rakor Kecamatan dan pembinaan PPKBD/Sub PPKBD



Kebijakan tersebut didukung dengan pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016, yaitu :

1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, berupa :
  - a. Penyusunan analisis parameter dan profil penduduk kewilayahan untuk 1 (satu) kabupaten/kota, yaitu Kota Yogyakarta
  - b. Sarasehan Pengendalian penduduk bagi pengelola dan pelaksana Program KKBPK yang dilaksanakan di 5 (lima) kabupaten/ kota se-DIY.
  - c. Forum/ pertemuan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk bersama 3 (tiga) mitra kerja, yaitu Fapsedu, Koalisi Kependudukan dan Forsada.
  - d. Sosialisasi kebijakan dampak kependudukan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah yang telah dilaksanakan di Kota Yogyakarta.
  - e. Kerjasama Pendidikan Kependudukan melalui KKN Tematik KKBPK yang diikuti oleh 42 kelompok KKN yang berasal dari 3 (tiga) universitas, yaitu UGM, UNY, UNISA yang disertai dengan pembekalan materi praktek lapangan (KKN) yang dilakukan oleh 3 (tiga) universitas tersebut.
  - f. Penggandaan/ pengembangan/ adaptasi Modul pendidikan kependudukan baik untuk jalur formal (SMP/ SMA) dan informal (Pramuka dan Ponpes) di 5 (lima) kabupaten/kota se-DIY
  - g. Sosialisasi Standarisasi Pelayanan KB di 5 (lima) kabupaten/ kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - h. Peningkatan sosialisasi kesertaan MKJP di 5 (lima) kabupaten/ kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.



2. Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan, berupa :
  - a. Penggerakan dan pemantapan pelayanan KB Baru MKJP (PB) MOP sebanyak 223 akseptor; MOW sebanyak 665 akseptor; IUD sebanyak 4.927 akseptor; Implant sebanyak 2.422 akseptor
  - b. Penggerakan dan pemantapan pelayanan KB ganti cara MOP sebanyak 32 akseptor; MOW sebanyak 130 akseptor; IUD sebanyak 2.355 akseptor; Implant sebanyak 3.035 akseptor
  - c. Pelayanan Pencabutan Implant sebanyak 1.494 kasus dan Ayoman Kegagalan sebanyak 5 kasus
  - d. Penggerakan/Pembinaan kesertaan KB dan KR di wilayah dan sasaran khusus tingkat kabupaten/kota se-DIY
  - e. Penguatan pelayanan KB MKJP di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta jaringan/jejaringnya baik pemerintah dan swasta di tingkat Kab/Kota se-DIY
  - f. Penggerakan Faskes Yan KB melalui petugas lapangan (penghubung faskes) untuk 246 faskes
  - g. Fasilitasi penggerakan pelayanan KB bersama Kodim se DIY
  - h. Fasilitasi penggerakan pelayanan KB bersama Polri (Polda DIY)
  - i. Promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi dan hak-hak reproduksi di 89 Faskes
  - j. Promosi dan konseling kesehatan reproduksi dan hak- hak reproduksi di 750 kelompok kegiatan
  - k. Penggandaan dan distribusi materi konseling Kesehatan Reproduksi di Faskes dan Poktan di seluruh kab/ kota se-DIY



3. Pembinaan pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah, berupa:
  - a. Penyusunan peta kerja KSPK kewilayahan di 5 (lima) kabupaten/kota se-DIY
  - b. Sosialisasi materi dan informasi pembinaan pembangunan Keluarga (BKB, BKR, BKL, dan PEK/UPPKS) di 5 (lima) kabupaten/kota se-DIY
  - c. Dukungan pembinaan Kelompok BKL sebanyak 130 kelompok
  - d. Dukungan pembinaan Kelompok UPPKS sebanyak 527 kelompok
  - e. Koordinasi/ fasilitasi dengan mitrakerja yang memiliki akses peningkatan kualitas bagi kelompok UPPKS di 5 (lima) kabupaten/ kota se-DIY
4. Penggerakan *stakeholder*, mitra kerja, serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat, berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam Program KKBPK, berupa :
  - a. Pengembangan advokasi dan KIE "*below the line*" program KKBPK
  - b. Peningkatan penggerakan MUPEN sebagai sarana KIE peningkatan MKJP
  - c. Pertemuan Lengkap IMP Tingkat Desa/Kelurahan sebanyak 438 desa/kelurahan
  - d. Fasilitasi penggerakan Program KKBPK bagi penyuluh KB (PKB/PLKB)/Tim Operasional Tingkat Desa (TKBK) di 438 desa/kelurahan
  - e. Pembinaan KKBPK bagi masyarakat oleh PPKBD/ Kader Tingkat Desa sebanyak 438 PPKBD





- f. Pertemuan Kemitraan Program KKBPK tingkat Kecamatan (Rakor Kecamatan) di 78 kecamatan se-DIY
  - g. Pertemuan Kemitraan Program KKBPK tingkat Desa/Kelurahan (Rakor Desa) di 438 desa/kelurahan
  - h. Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penggerakan mekanisme operasional lini lapangan melalui Monitoring Baksos TNI, KB, Kes di 5 Kab/Kota
  - i. Peningkatan dukungan dan fasilitasi stakeholder dan mitra kerja tingkat Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka penggerakan operasional program KKBPK di lini lapangan yang diberikan kepada 3 mitra kerja, yaitu PKK, TNI, dan Institusi Masyarakat Pedesaan.
  - j. Pembentukan "Kampung KB" (*pilot project* - 1 Kampung KB percontohan di setiap Kab/ Kota) di 5 (lima) Kabupaten/ Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Pengelolaan Program Pelatihan dan Pengembangan Provinsi, berupa :
- a. Pembinaan SDM Aparatur provinsi melalui Diklatpim IV yang diikuti oleh 1 (satu) orang pejabat eselon IV
  - b. Peningkatan kapasitas Widyaiswara yang diikuti oleh 7 (tujuh) orang Widyaiswara
  - c. Peningkatan Kompetensi SDM Latbang (Pelatihan Teknis bagi pengelola/pelaksana Program) yang diikuti oleh Kepala Bidang Latbang dan 3 (tiga) pejabat eselon IV di Bidang Latbang
  - d. Orientasi Program KKBPK bagi Toga/Toma, LSOM, dan Mitra Kerja yang diikuti oleh pengurus Fapsedu sebanyak 14 (empat belas) orang.



- e. Diklat Fungsional Dasar bagi PKB (PNS) sebanyak 5 (lima) orang peserta
  - f. Diklat Teknis Program KKBPK bagi PLKB Non PNS sebanyak 7 (tujuh) orang peserta
  - g. Refreshing PLKB/PKB (PNS dan Non PNS) bagi 114 PKB/PLKB
  - h. Pelatihan Teknis Pembinaan Program KKBPK bagi PPKBD sebanyak 20 PPKBD
  - i. Pelatihan Teknis Advokasi dan KIE bagi Pengelola Program KKBPK yang diikuti oleh Pengelola Kampung KB sebanyak 18 orang.
  - j. Pelatihan Teknis Komunikasi Perubahan Perilaku (BCC) bagi mitra kerja yang diikuti oleh Pengelola Kampung KB sebanyak 18 orang peserta.
6. Dukungan manajemen pengelolaan Program KKBPK di provinsi, berupa:
- a. Inventarisasi PKB/PLKB di 5 (lima) kabupaten/kota se-DIY
  - b. Distribusi Alokasi ke 5 (lima) kabupaten/kota se-DIY
  - c. Pemetaan Urusan Bidang KKBPK di Kab/Kota (UU 23 thn 2014) di 5 (lima) kabupaten/kota se-DIY
  - d. Fasilitasi P2D PKB/PLKB (UU 23 thn 2014) di 5 (lima) kabupaten/kota se-DIY
  - e. Monitoring dan evaluasi terpadu pelaksanaan program KKBPK (seluruh Bidang) di 5 (lima) kabupaten/kota se-DIY

Sedangkan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 sebagai upaya untuk menurunkan angka *unmetneed* sekaligus meningkatkan pencapaian peserta KB baru serta meningkatkan persentase PUS yang



memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi modern adalah sebagai berikut :

1. Melakukan promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB;
2. Melakukan Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;
3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program KKBPK dalam tahun 2017 dan harus difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian PB rendah dan Unmeet Need yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di daerah legok;
4. Sekaitan dengan Stock Out alat dan obat kontrasepsi di gudang Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan identifikasi ketersediaan alokon di Kabupaten/Kota untuk dilakukan distribusi dinamis dengan mekanisme yang ada.

Sedangkan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 untuk meningkatkan capaian porsentasi temuan eksternal dan internal yang selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut :

1. Mengimplementasi SPIP di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta secara efektif dan efisien
2. Memperkuat peran pengawasan sebagai penjamin mutu (*quality assurance*); dan
3. Meningkatkan porsi pemberian masukan dan konsultasi (*consulting*) oleh pengawasan dalam rangka memperkuat upaya pencegahan terjadinya kesalahan/ penyimpangan.



### C. Realisasi Anggaran

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat penyerahan DIPA Tahun 2016 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2015 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 40.618.678.000,-. Pada bulan Mei 2016, dilakukan efisiensi Tahap I sebesar Rp. 3.701.816.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 36.916.862.000,-, pada tribulan terakhir terjadi efisiensi kembali sebesar Rp. 8.028.504.000,- sehingga Anggaran Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan program sebesar Rp. 28.888.358.000,- dengan realisasi sebesar 91,89% atau Rp. 26.544.399.276,-, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 13**  
**Rincian Realisasi Anggaran**

Program / Output				Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi ( % )
068.01.01	5297	.001	Dukungan manajemen pengelolaan Program KKBPK di Provinsi (layanan)	1.610.237.000	1.518.940.854	94,33
068.01.01	5297	.994	Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)	14.704.014.000	14.243.049.149	96,87
068.01.01	5297	.995	Kendaraan Bermotor (Unit)	205.000.000	204.925.000	99,96
068.01.01	5297	.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	29.400.000	29.396.975	99,99
068.01.01	5297	.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (Unit)	49.000.000	48.938.500	99,87
068.01.01	5297	.998	Gedung/Bangunan (M2)	40.000.000	39.841.200	99,60
068.01.03	5298	.001	Pengawasan intern yang efektif efisien terhadap pengelolaan program KKBPK (LHP)	71.609.000	61.281.125	85,58
068.01.04	5299	.001	Pendidikan dan pelatihan Program KKBPK di provinsi (orang)	774.874.000	760.746.439	98,18
068.01.04	5299	.002	Penelitian dan pengembangan Program KKBPK di provinsi (Hasil Penelitian)	720.277.000	704.100.350	97,75

Sumber data : F/II/Keu



## Bab IV Penutup

Pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 menyajikan informasi realisasi kinerja dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan, disertai analisis capaian serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka evaluasi guna perbaikan di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran program Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran strategis BKKBN tahun 2016.

### A. Simpulan

1. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 yang masuk dalam kategori BAIK {HIJAU} dengan rentang pencapaian antara 100% s.d. 145% adalah :
  - a. Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi (*CPR*)
  - b. Angka Kelahiran pada remaja usia 15 – 19 tahun (*ASFR* 15 – 19)
  - c. Persentase Peserta KB Baru MKJP
  - d. Persentase Peserta KB Aktif MKJP
  - e. Jumlah peserta KB aktif (*PA*)

- f. Persentase PUS anggota poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS yang ber-KB :
    - 1) Persentase PUS anggota BKB yang ber-KB
    - 2) Persentase PUS anggota BKR yang ber-KB
    - 3) Persentase PUS anggota BKL yang ber-KB
    - 4) Persentase PUS anggota UPPKS yang ber-KB
  - g. Indeks pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
  - h. Persentase sasaran yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi
  - i. Persentase masyarakat yang mengetahui isu kependudukan
  - j. Persentase provinsi yang memasukan program KKBPK dalam Musrenbang
  - k. Persentase kab/ kota yang memasukan program KKBPK dalam Musrenbang
  - l. Laporan realisasi triwulanan kab/ kota penerima DAK tahun 2016
  - m. Laporan keuangan dan pengelolaan BMN yang dapat diselesaikan tepat waktu, akuntabel, kredibel dan memenuhi standar kepatutan
  - n. Pemetaan urusan bidang pengendalian penduduk dan KB di kab/ kota dalam penguatan program KKBPK
2. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 yang masuk dalam kategori CUKUP {KUNING} dengan rentang pencapaian antara 81,94% s.d. 93,4% adalah :
- a. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmetneed*)
  - b. Persentase kesertaan KB Pria (PA) (MOP+Kondom)
  - c. Jumlah ketersediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu



3. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 yang masuk dalam kategori KURANG {MERAH} dengan rentang pencapaian antara 48,67% s.d. 80,00% adalah :
  - a. Jumlah peserta KB baru (PB)
  - b. Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi modern
  - c. Persentase temuan eksternal dan internal yang selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

## **B. Langkah-Langkah ke Depan**

Berdasarkan capaian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016, langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB; dengan menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program KKBPK dalam tahun 2017 dan harus difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian PB rendah dan *unmetneed* yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di daerah legok.
2. Melakukan Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;
3. Mengimplementasi SPIP di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta secara efektif dan efisien serta memperkuat peran pengawasan sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan sebagai konsultan dalam rangka pencegahan terjadinya kesalahan/penyimpangan;



4. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dalam perencanaan kinerja yang terkait dengan penetapan sasaran, indikator kinerja dan target agar indikator yang ditetapkan dapat mencerminkan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Pemanfaatan LKIP sebagai bahan masukan dan acuan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.







# Lampiran

**PERATURAN  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 199 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2015 - 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Kementerian/Lembaga melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019, perlu menyesuaikan kebijakan anggaran yang berorientasi pada program dan kegiatan prioritas guna mencapai tujuan pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015 -2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra BKKBN, merupakan dokumen yang memuat gambaran tentang mandat, tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta peran, kondisi, tantangan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran strategis yang harus di capai serta indikator *output*, indikator *outcome*, target capaian, pendanaan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

## Pasal 2

Renstra BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tentang :

- a. Visi;
- b. Misi;
- c. Tujuan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- d. Sasaran Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- e. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional;
- f. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- g. Kerangka Regulasi;
- h. Kerangka Kelembagaan;
- i. Target Kinerja; dan
- j. Kerangka Pendanaan.

## Pasal 3

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

## Pasal 4

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar sinkronisasi kebijakan dan integrasi antara kegiatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan program dan kegiatan pemangku kepentingan dan mitra kerja.

## Pasal 5

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 disusun sebagai pedoman setiap unit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam:

- a. penyusunan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ditingkat nasional;
- b. penyusunan Rencana Strategis Daerah yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang; dan
- c. penyusunan Rencana Belanja Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).



Pasal 6

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 disusun untuk meningkatkan akuntabilitas, kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada umumnya dan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada khususnya.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 212/PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2016

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SURYA CHANDRA SURAPATY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1441

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. TARGET KINERJA

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L) 2015-2019, maka BKKBN menyusun Renstra 2015-2019 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra BKKBN 2015-2019 mengacu pada sasaran program (outcome), sasaran kegiatan (output) dan indikator-indikator yang telah tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. Kemudian pengembangan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Komponen dan Sub Komponen juga harus mempertimbangkan upaya perwujudan tujuan BKKBN untuk "mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas". Selain itu, dalam penyempurnaan Renstra ini, BKKBN juga memperhatikan berbagai prioritas pembangunan yang telah dirumuskan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017.

#### 4.1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR)
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019**

INDIKATOR	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,60	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	2,28
2 Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)	57,9	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,3
3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91	9,91
4 Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	18,3	20,50	21,19	21,70	22,30	23,50	23,50
5 Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27,1	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6	24,6

#### 4.1.2 Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (Outcome) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019. BKKBN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sehingga hanya mempunyai 1 (satu) Program Teknis yaitu Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta 3 (tiga) Program Generik yaitu: 1) Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN; 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya; 3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN.

##### 1. Sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP)

Sasaran Program (Outcome) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah Terlaksananya Program KKBP di seluruh tingkatan wilayah. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga sebagai berikut:

- Jumlah peserta KB baru /PB (juta)
- ASFR 15-19 Tahun
- Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern
- Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga
- Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana
- Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan
- Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu

## **2. Sasaran Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN**

Sasaran Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN adalah meningkatnya kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN sebagai berikut:

- Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga fungsional
- Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi
- Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK
- Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan Internasional, penelitian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan
- Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi

## **3. Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN**

Sasaran Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya adalah tersedianya dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan Program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya sebagai berikut:

- Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB
- Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK
- Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja
- Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap)
- Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran
- Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi



#### **4. Sasaran Program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN**

Sasaran Program (Outcome) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN adalah meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN sebagai berikut:

- Persentase Temuan Penyimpangan Strategis dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit
- Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN provinsi

##### **4.1.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan**

Sasaran Kegiatan adalah keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program. Sasaran kegiatan merupakan keluaran yang harus dihasilkan oleh unit kerja Eselon II dengan alat ukur tingkat keberhasilan pencapaiannya menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sasaran Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk masing-masing unit kerja Eselon II telah disusun untuk seluruh Program dan Bidang di lingkungan BKKBN (tertera pada matrik lampiran Renstra ini).

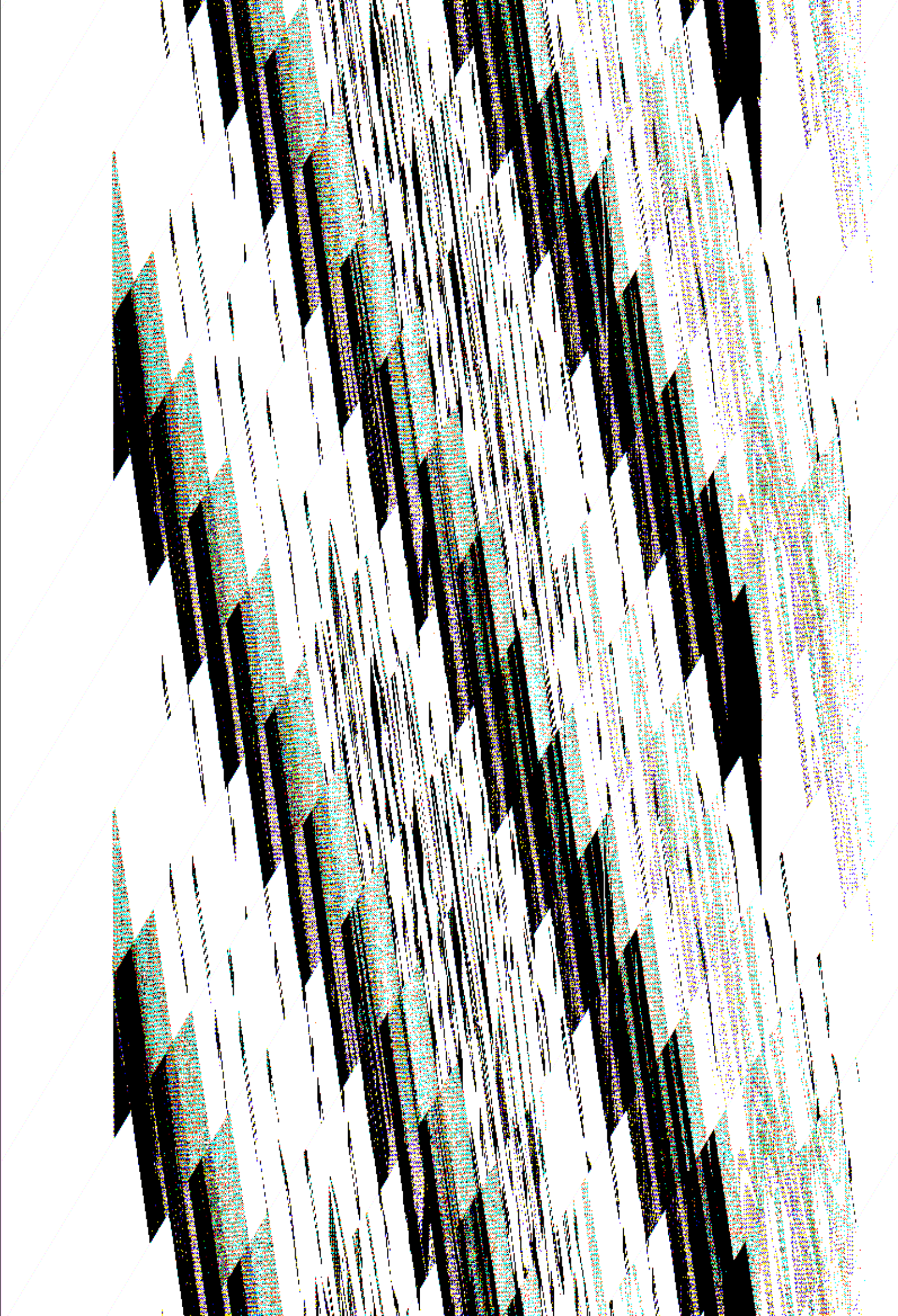
#### **4.2. KERANGKA PENDANAAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Dokumen penyusunan anggaran yang dibutuhkan sebelum APBN ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR, adalah RKA/KL dan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN). RKA-K/L merupakan dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga, sedangkan RDP BUN adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

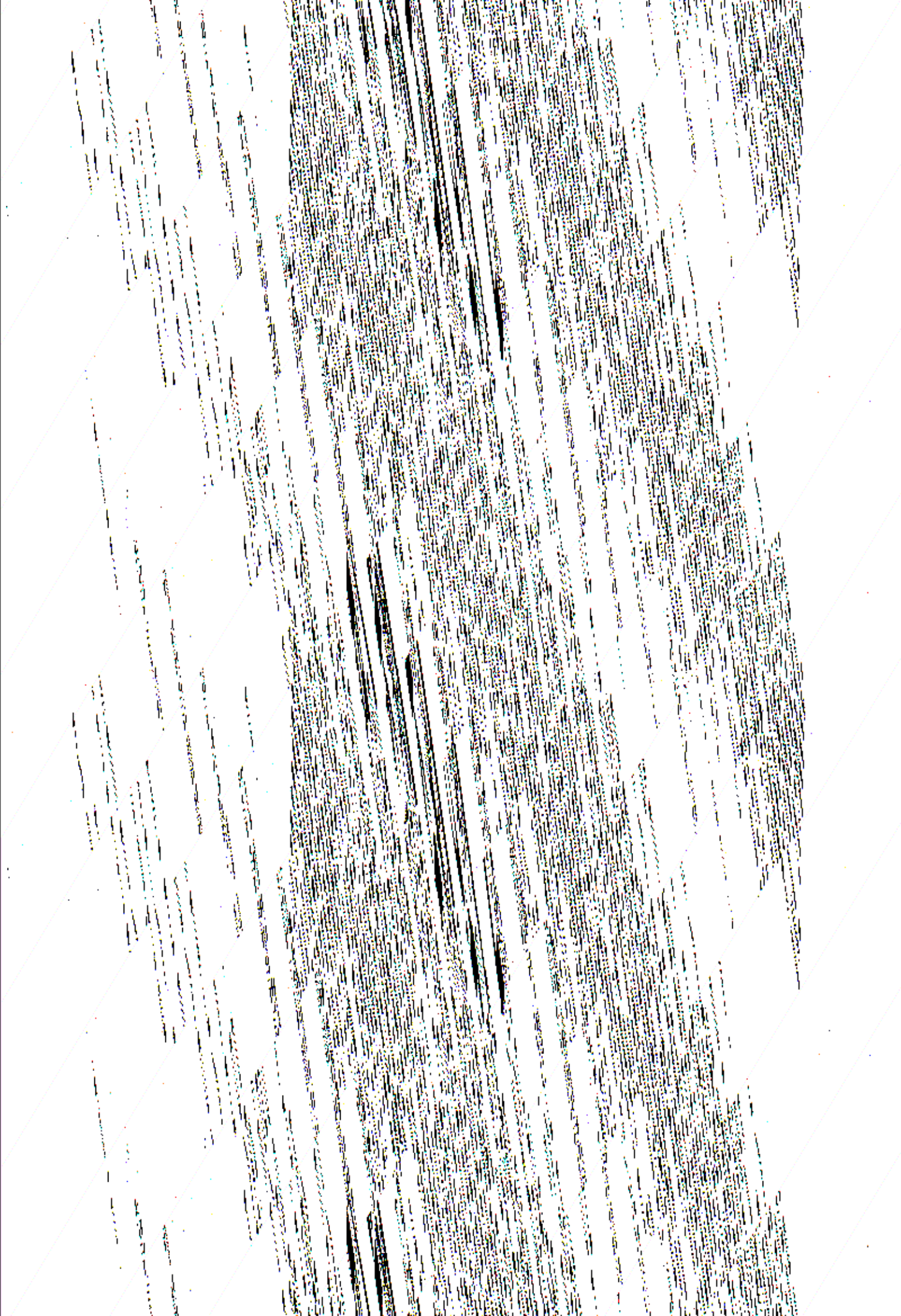
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 juga mengatur bahwa penyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), penganggaran terpadu (unified budgeting) dan penganggaran berbasis kinerja (PBK).



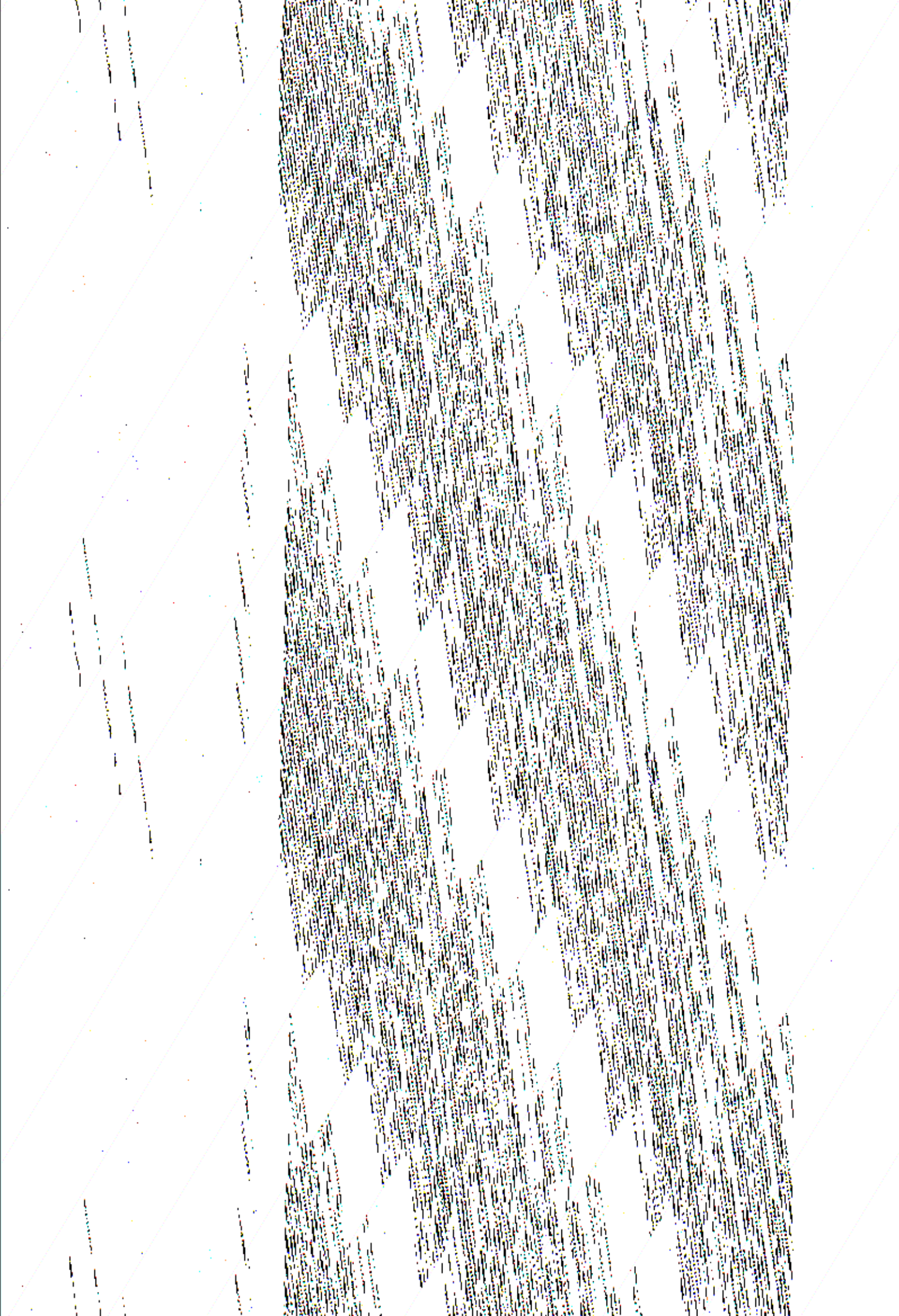


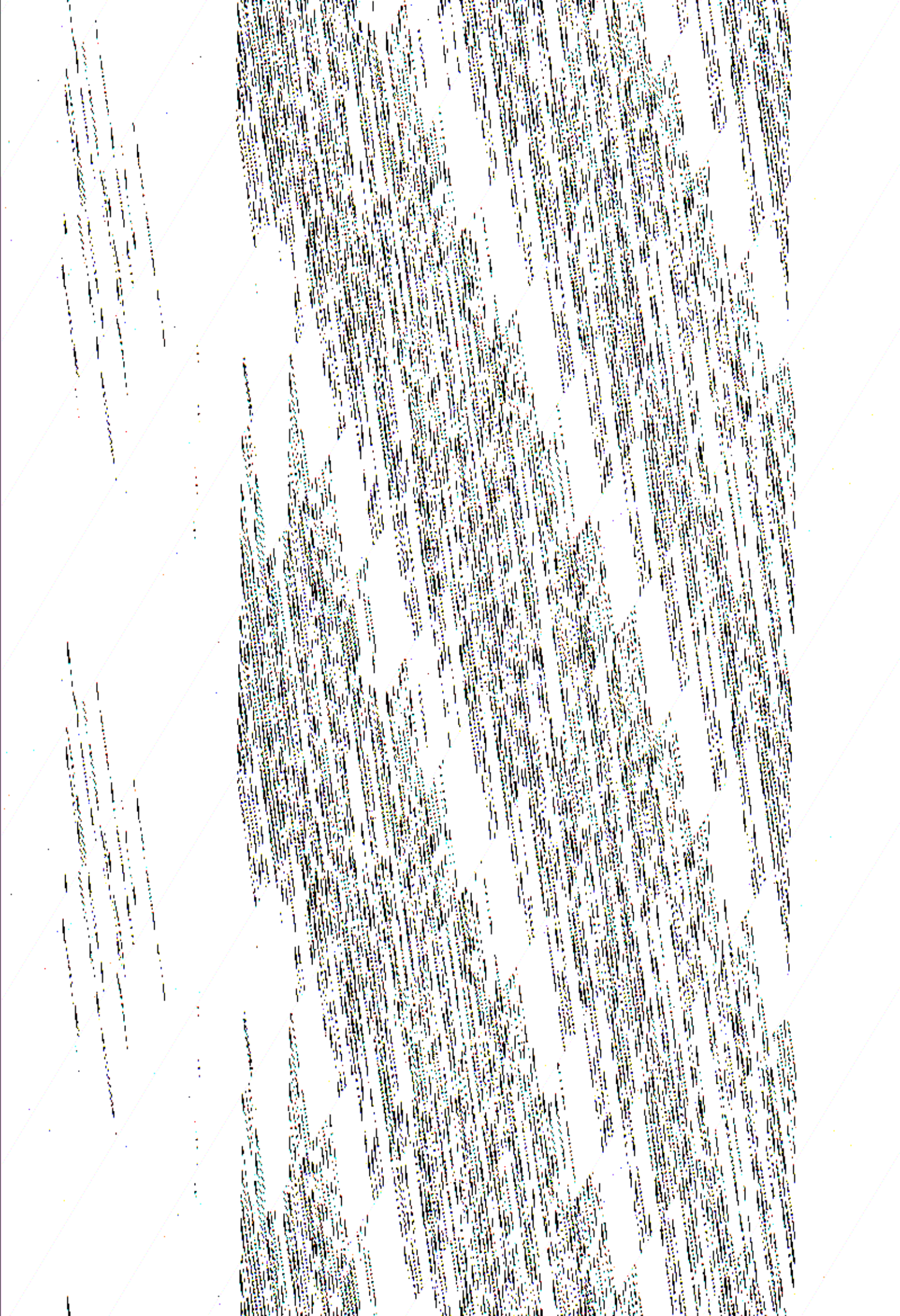




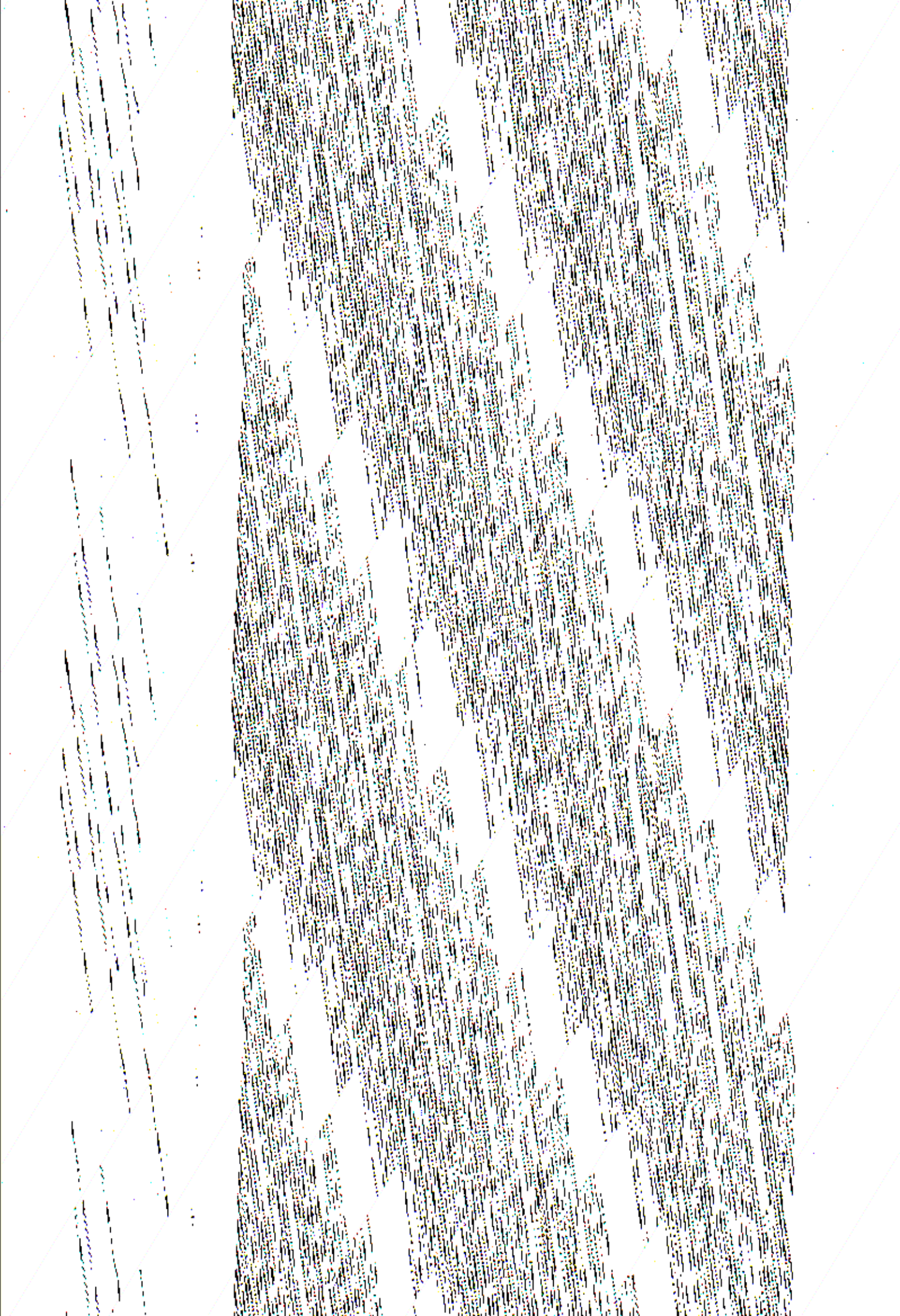


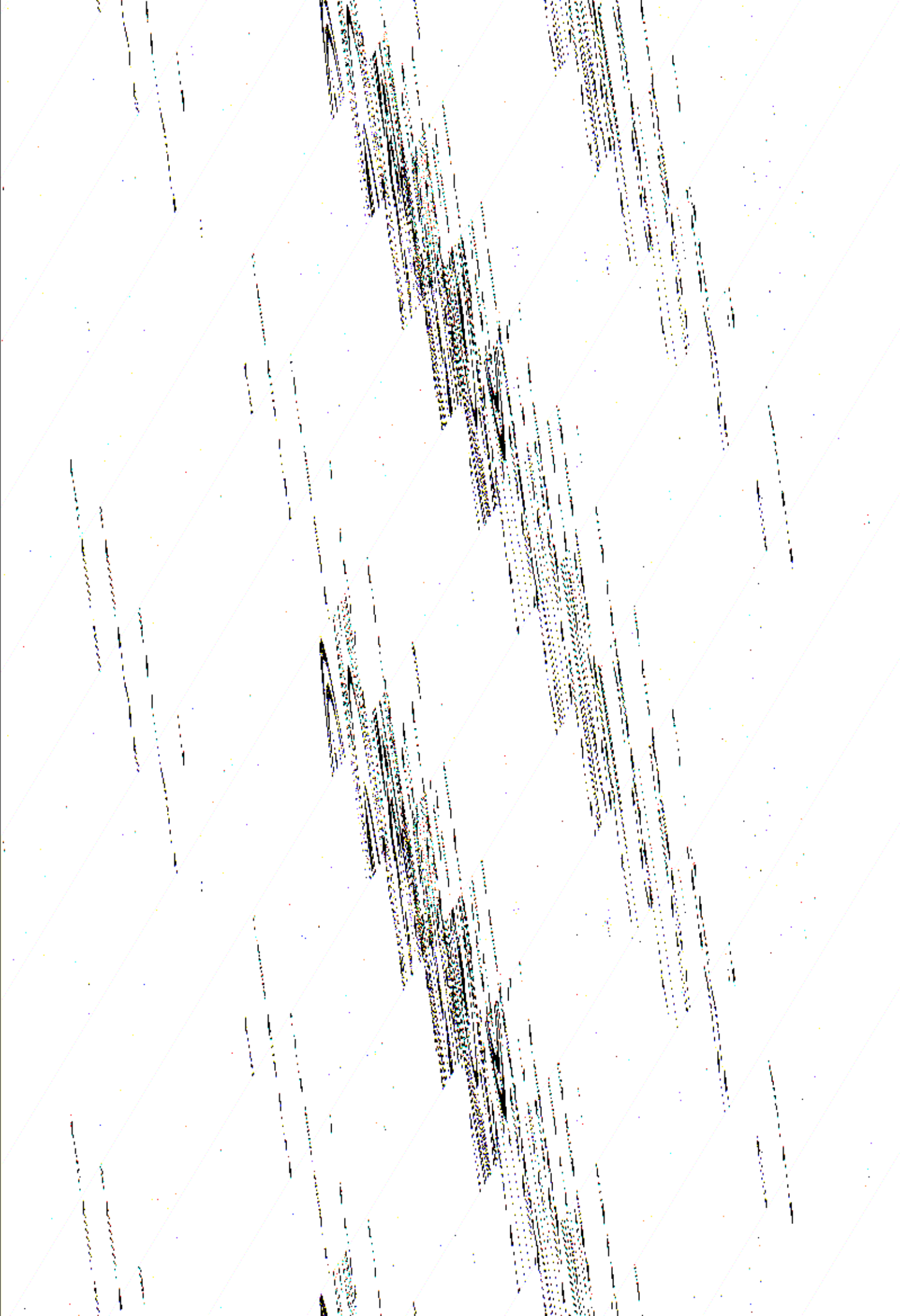




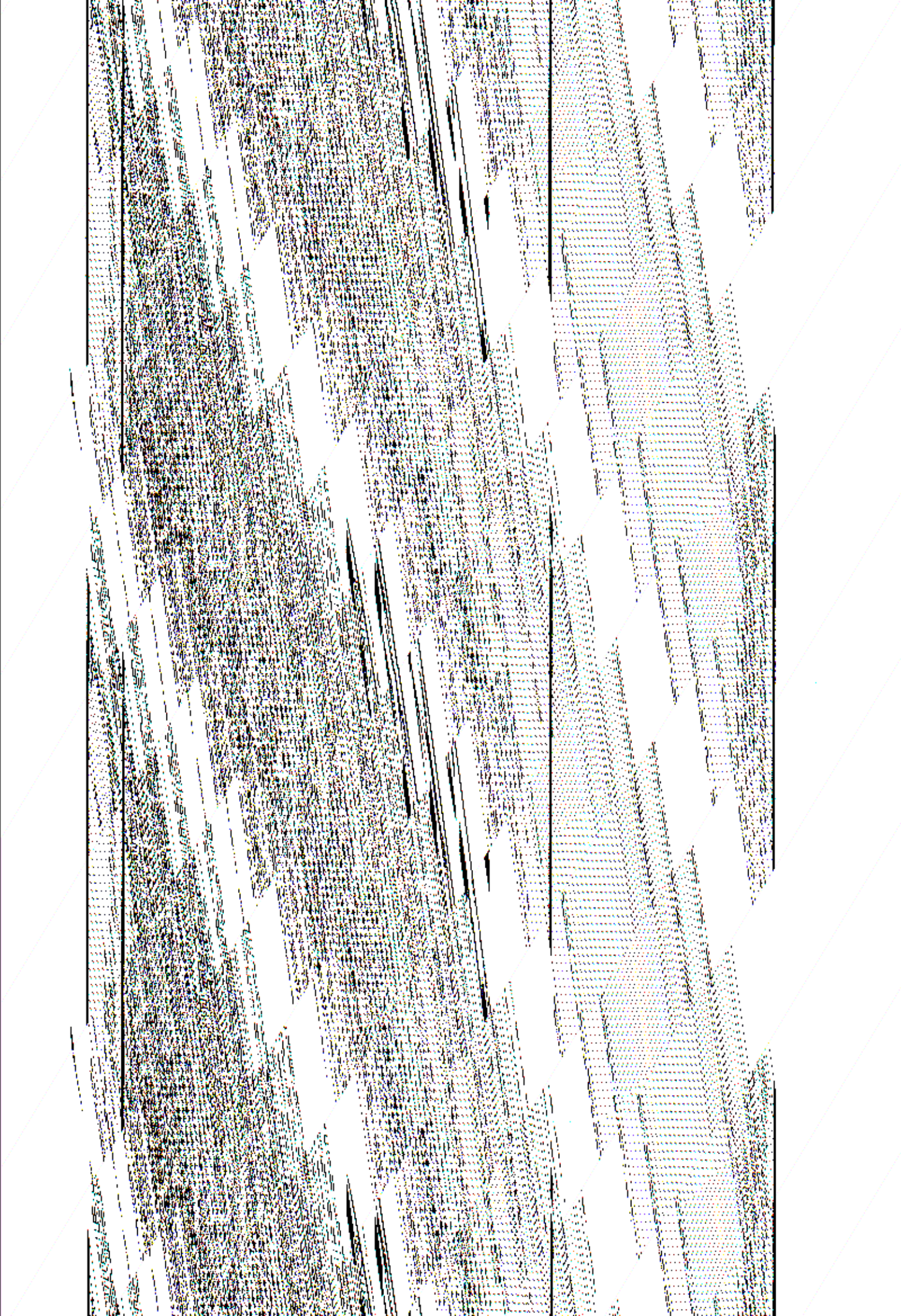














STRUKTUR PROGRAM DAN ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI TA 2016

Perwakilan BKKBN Provinsi / D.I. Yogyakarta

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
	PADU PERWAKILAN BKKBN PROVINSI		2016	
	Program Kependudukan / KB dan Pembangunan Keluarga		40.818.878.000	
3331.076	Pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di Provinsi		18.873.888.000	
3331.076	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk		1.771.098.000	
3331.076001	Tanpa Sub Output			
18.11	Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi pengendalian penduduk yang dilaksanakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota		260.000.000	
E11	Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi pengendalian penduduk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota			
a	Pengembangan materi pengendalian data dan informasi kependudukan serta materi advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk			
b	Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk ke Provinsi/Tk. Kab dan Kota			
c	Penyusunan analisis parameter dan profil penduduk kewilayahan	Kab/Kota		
d	Diseminasi data parameter kependudukan dan profil penduduk kewilayahan kepada stakeholder/instansi sektor prioritas	5		
e	Sosialisasi dan Diseminasi kebijakan dan strategi pengendalian penduduk bagi pengelola dan pelaksana Program KB/KP	5	Kab/Kota	
f	Kegiatan lain yang terkait IKK dan disesuaikan dengan kondisi wilayah			
18.12	Jumlah kegiatan penyeragaman kebijakan pengendalian penduduk dengan lintas sektor di tingkat Provinsi dan Kab/Kota		230.000.000	
B12	Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk			
a	Fasilitasi/pemaduan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten/Kota			
b	Forum/pertemuan penyeragaman kebijakan pengendalian penduduk dengan mitra kerja	5	Mitra Kerja	
c	Kajian dan pengembangan materi kebijakan pengendalian penduduk dengan mitra kerja			
d	Fasilitasi/pemaduan pengintegrasian parameter kependudukan kedalam Rencana Provinsi dan Kab/Kota			
e	Sosialisasi hasil penyeragaman kebijakan pembangunan sektor dengan pembangunan KKB ke Provinsi dan kabupaten dan kota			
f	Peningkatan kapasitas tenaga pengelola dan pelaksana pengendalian penduduk Kab/Kota			
g	Fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah dalam Bidang Pengendalian Penduduk			
h	Kegiatan lain yang terkait IKK dan disesuaikan dengan kondisi wilayah			
18.13	Jumlah sosialisasi kebijakan dampak kependudukan dan pengembangan model solusi strategi dampak kependudukan		340.000.000	
B13	Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dampak kependudukan dan pengembangan model solusi strategi dampak kependudukan			
a	Pengembangan model solusi strategi dampak kependudukan kewilayahan			
b	Sosialisasi kebijakan dampak kependudukan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah	5	Kab/Kota	
c	Pengembangan kebijakan analisis dampak kependudukan dan model solusi strategi analisis dampak kependudukan			
d	Kegiatan lain yang terkait IKK dan disesuaikan dengan kondisi wilayah			
18.14	Peningkatan kerjasama pendudukan kependudukan		841.000.000	
B14	Peningkatan kerjasama pendudukan kependudukan			
a	Kerjasama Pendudukan Kependudukan melalui KKN Tematik KKBPK	42	Kirip KKN	
b	Pengawasan materi praktik lapangan (KKN)	3	Livestasis	
c	Kuliah Umum/pembekalan mahasiswa baru terkait isu kependudukan			
d	Pengembangan/pengembangan/ adaptasi Modul pendidikan kependudukan (Formal, Modul bagi SMP dan SMA)	9	Kab/Kota	Materi dan Diseminasi 15 judul untuk PIRANUKA dan 6 judul untuk PIRANUKA
e	Pengembangan/pengembangan/ adaptasi Modul pendidikan kependudukan (Informal Modul bagi Pramuka dan PoriPori)	5	Kab/Kota	Materi dan Diseminasi 15 judul untuk PIRANUKA dan 6 judul untuk PIRANUKA
f	Workshop modul pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal bagi Mitra Kerja dan Stakeholders			
g	Forum kerjasama/koordinasi lintas sektor terkait mitra kerja stakeholder kerjasama pendudukan kependudukan serta pembentukan Pokja Pendudukan kependudukan			
h	Diseminasi Pendidikan Kependudukan kepada khalayak antara lain melalui lomba, jingle, pidato, pameran, ekspedisi, blog, dan lain-lain bertema Pendidikan Kependudukan			
i	Kegiatan lain yang terkait IKK dan disesuaikan dengan kondisi wilayah			
3331.076	Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan		8.163.396.000	
3331.076.002	Tanpa Sub Output			
18.21	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi operasional dan materi informasi tentang akses dan peningkatan kualitas pembinaan kesertaan ber-KB yang sesuai dengan standar/isi pelayanan KB		380.000.000	
B21	Sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi operasional dan materi informasi tentang akses dan peningkatan kualitas pembinaan kesertaan ber-KB			
a	Sosialisasi/peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dalam Jaringan Kesehatan Nasional (JKN)			
b	Sosialisasi Standar/isi Pelayanan KB	5	Kab/Kota	
c	Sosialisasi akses dan kualitas Pembinaan kesertaan KB wilayah khusus dan sasaran khusus			
d	Diseminasi akses dan kualitas Pembinaan kesertaan KB wilayah khusus dan sasaran khusus			
e	Pengembangan dan sosialisasi jejaring pelayanan KB antara lain Jaringan Kesehatan Nasional (JKN)			
f	Peningkatan sosialisasi kesertaan KB/KP	5	Kab/Kota	
g	Sosialisasi jaringan keorganisasian komunitas era JKN			
h	Sosialisasi jaringan khusus era JKN			
i	Kegiatan lain yang terkait IKK dan disesuaikan dengan kondisi wilayah			

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT ( SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		2016			
				6.132.360.000	
18.22	Jumlah pergerakan pelayanan KB (PB MKJ/P), pelayanan ganti cara (Pa MKJ/P), pelayanan komposisi berat, Pencabutan Implant dan Kegiatan yang diindikasikan				
	822 Pergerakan dan pemantapan pelayanan KB Baru MKJ/P (PB)	350 Peserta			
	a. MCP	1.030 Peserta			
	b. MOW	18.010 Peserta			
	c. IUD	6.060 Peserta			
	d. IMPLANT				
	823 Pergerakan dan pemantapan pelayanan KB ganti cara	71 Peserta			
	a. MCP	130 Peserta			
	b. MOW	8.370 Peserta			
	c. IUD	6.660 Peserta			
	d. IMPLANT				
	824 Pelayanan komposisi berat	14 Kasus			
	a. IUD				
	b. IMCP	3 Kasus			
	c. MOW	2 Kasus			
	d. IMPLANT				
	825 Pelayanan Pencabutan Implant dan Kegiatan	3.099 Kasus			
	a. Pelayanan pencabutan implant	170 Kasus			
	b. Pelayanan syman keputihan				
				424.000.000	
18.26	Jumlah pergerakan pelayanan KB di wilayah khusus dan Galatias				
	826 Pergerakan Pelayanan KB mobile di wilayah khusus dan galatias				
	a. Koordinasi Pergerakan pelayanan KB mobile di wilayah dan satuan khusus dengan mitra lokal				
	b. Sosialisasi dalam pembinaan kesetaraan KB pra				
	c. Pergerakan Pelayanan KB mobile di wilayah dan satuan khusus dengan mitra lokal				
	d. Evaluasi pergerakan KB di wilayah dan satuan khusus				
	e. Peningkatan komitmen dalam penggerakan KB dan KR di Wilayah dan Satuan Khusus	5 Kabkota			
	f. Peningkatan Pembinaan kesetaraan KB dan KR di wilayah dan satuan khusus & Kabupaten				
	g. Peningkatan pelayanan KB mobile (bergerak) berbasis desa di wilayah tertinggal				
	h. Kegiatan lain yang terkait IKK dan disesuaikan dengan kondisi wilayah				
				526.040.000	
18.27	Persentase Fasilitas dan jejaringnya (seluruh tingkatan wilayah) yang mendukung pelayanan KB dan KR sesuai dengan standarisasi pelayanan				
	827 Fasilitas KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan GDP dan kesehatan reproduksi	5 Kabkota			
	a. Penguatan pelayanan KB MKJ/P di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Lanjutan (FKRTL) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTR) serta jaringan/jejaringnya baik pemerintah dan swasta di Tl. Kabkota				
	b. Pergerakan Fasilitas Yan KB melalui pelupuk lapangan (penghubung kelas)	289 Fasilitas			
	c. Pemetaan jaminan ketersediaan dan uji kualitas Akses (uji age mulai) uji UCI				
	d. Pemetaan jaminan ketersediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas dalam Pelayanan KB				
	e. Monitoring ketersediaan Akses dan Sarana Pelayanan KB di Seluruh tingkatan wilayah				
	f. Kualitas pasca pelayanan GTU bag powder	31 Orang			
	g. Fasilitas pergerakan pelayanan KB berbasis Kodes	5 Kodes			
	h. Fasilitas pergerakan pelayanan KB berbasis Poin (Podal)	1 Poda			
	i. Pergerakan Pelayanan IVA/peminar sinergis IUD (kegiatan momentum)				
	j. Kegiatan lain yang terkait IKK dan disesuaikan dengan kondisi wilayah				
				635.000.000	
18.28	Persentase Fasilitas yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota				
	828 Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	252 Fasilitas			
	a. Promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi dan hak-hak reproduksi di Fasilitas				
	b. Promosi dan konseling kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi di kelompok kegiatan	744 Poktan			
	c. Ketersediaan (pengadaan dan distribusi) materi konseling kesehatan Reproduksi di Fasilitas dan Poktan di seluruh Kabkota				
	d. Bulan buku kesehatan reproduksi	5 Kabkota			
	e. Forum kesehatan reproduksi tingkat provinsi				
	f. Lomba promosi dan konseling kesehatan reproduksi				
	g. Kegiatan lain yang terkait IKK dan disesuaikan dengan kondisi wilayah				
18.29	Jumlah Provinsi yang mengembangkan manajemen pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, melalui penguatan pelayanan MUYAN kecamatan, dan jaminan ketersediaan Akses dan sarana-prasarana KB				
	829 Pengembangan manajemen pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, melalui penguatan pelayanan MUYAN kecamatan, dan jaminan ketersediaan Akses dan sarana-prasarana KB				
	a. Pelaksanaan kegiatan KB rencana sesuai buku panduan KB rencana				
				4.034.900.000	
3331.077	Pembinaan pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah				
3331.077.003	Tempa Sub Output			100.000.000	
18.31	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan dieminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah				
	831 Sosialisasi dan dieminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah				
	a. Pengembangan Kebijakan pelaksanaan kegiatan serta masih dari informasi pembinaan pembangunan Keluarga (Poktan) yang sesuai dengan kondisi kewilayah	5 Kabkota			
	b. Penaukunan pengkera KSPK kealajaan				
	c. Sosialisasi Kebijakan strategi pembinaan pembangunan Keluarga (BKR, BKL, dan PEKUPPKS) Tl. Prov dan Kabkota				
	d. Sosialisasi metod dan informasi pembinaan pembangunan Keluarga (BKR, BKL, dan PEKUPPKS) Tl. Prov dan Kabkota	5 Kabkota			
	e. Fasilitas dan penyediaan dukungan pemroses pembangunan Keluarga Tl. Kabkota				
	f. Kegiatan lain yang terkait IKK dan disesuaikan dengan kondisi wilayah				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		2018	2019		
18.32	Jumlah Fasilitas Kegiatan dan pembentukan PPKS di seluruh tingkatan wilayah			114.000.000	
	832 Fasilitas Kegiatan dan pembentukan PPKS di seluruh tingkatan wilayah				
	a. Dukungan kegiatan PPKS Provinsi				
	b. Sosialisasi PPKS di seluruh tingkatan wilayah				
	c. Pengembangan materi dan media KIE PPKS untuk dilaksanakan di seluruh tingkatan wilayah				
	d. Fasilitas pembentukan PPKS tingkat kabupaten/kota (1 kecamatan/pembentukan setiap kabupaten/kota)	1	Kabikota		
	e. Peningkatan kapasitas SDM Pengelola PPKS di seluruh tingkatan wilayah				
	f. Sosialisasi optimalisasi fungsi Balai Penyuluhan dalam pengembangan dan pembinaan PPKS				
	g. Pemutakhiran Data PPKS	1	Kabikota		
	h. Kegiatan lain yang terkait IKK dan disesuaikan dengan kondisi wilayah				
18.33	Jumlah provinsi yang melaksanakan BKR Holistik Integrative			1.170.500.000	
	833 Fasilitas Penguatan dan pembinaan BKR Holistik Integrative				
	a. Sosialisasi BKR HI				
	b. Fasilitas pembentukan dan pengembangan kelompok BKR HI				
	c. Dukungan sarana dan prasarana kelompok BKR HI (Kabikota yang tidak dapat DAK)				
	d. Dukungan operasional pembinaan kelompok BKR HI				
	e. Capacity Building bagi pengelola kader BKR dan PLKB				
	f. Dukungan pendampingan kelompok BKR HI				
	g. Monitoring dan Evaluasi kelompok BKR HI				
	h. Pemutakhiran Data kelompok BKR				
18.34	Jumlah provinsi yang melaksanakan Pembinaan GenRe (PK-RM dan BKR) di Provinsi (Jumlah Penguatan GenRe di seluruh tingkatan wilayah)			1.432.000.000	
	834 Pembentukan dan Pembinaan PK RM di Provinsi				
	a. Sosialisasi dan Promosi GenRe melalui PK RM				
	b. Rencana pembentukan dan pengembangan kelompok PK RM				
	c. Fasilitas sarana dan prasarana PK RM (Kabikota yang tidak dapat DAK)				
	d. Capacity Building bagi pengelola, Bendahar Sebayak dan Koordinator Sebayak				
	e. Dukungan pembinaan PK RM				
	f. Dukungan penguatan PK RM				
	g. GenRe cegah meledak seni budaya tradisional nasional				
	h. Pemutakhiran Data kelompok PK RM				
	835 Pembentukan dan pembinaan kelompok BKR				
	a. Sosialisasi dan Promosi GenRe melalui BKR				
	b. Rencana pembentukan dan pengembangan kelompok BKR				
	c. Fasilitas sarana dan prasarana BKR (Kabikota yang tidak dapat DAK)				
	d. Capacity Building bagi Kader Kelompok BKR				
	e. Dukungan pembinaan BKR				
	f. Dukungan penguatan BKR				
	g. Pemutakhiran Data kelompok BKR				
18.36	Jumlah kelompok BKL yang terbentuk dan mendapat pembinaan			251.800.000	
	836 Pembentukan dan pembinaan kelompok BKL				
	a. Sosialisasi Lansia Tangguh				
	b. Dukungan pembinaan kelompok BKL	127	Kelompok		
	c. Pengembangan kapasitas SDM pengelola BKL				
	d. Fasilitas sarana dan prasarana Lansia Tangguh (Kabikota yang tidak dapat DAK)				
	e. Evaluasi Pengembangan Lansia Tangguh				
	f. Dukungan fasilitas pembentukan kelompok BKL				
	g. Pemutakhiran Data kelompok BKL				
	h. Kegiatan lain yang terkait IKK dan disesuaikan dengan kondisi wilayah				
18.37	Jumlah kelompok UPPKS yang terbentuk dan mendapat pembinaan			250.800.000	
	837 Pembentukan kelompok UPPKS dan pembinaan PERK				
	a. Sosialisasi dan Promosi memandirikan ekonomi keluarga				
	b. Rencana pembentukan dan pengembangan kelompok UPPKS				
	c. Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (melalui upaya pendampingan serta sarana/prasarana kelompok UPPKS) pada sektor permodalan terakut				
	d. Dukungan pembinaan kelompok UPPKS	467	Kelompok		
	e. Fasilitas Penggelakan pembentukan dan pembinaan kelompok UPPKS terintegrasi dengan sektor terkait				
	f. Pendampingan Kelompok UPPKS				
	g. Mendukung, evaluasi dan pembinaan kelompok UPPKS				
	h. Koordinasi/inkuisi dengan mitra/lembaga yang memiliki akses peningkatan kualitas bagi kelompok UPPKS	1	Kabikota		
	i. Pemutakhiran Data kelompok UPPKS				
	j. Kegiatan lain yang terkait IKK dan disesuaikan dengan kondisi wilayah				
3331.078	Pelaksanaan stakeholder, mitra kerja, serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat, berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam Program KKBPK			6.764.370.000	
	3331.078.004 Tanpa Sub Output				
18.41	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKB			398.900.000	
	841 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKB				
	a. Pengembangan advokasi dan KIE "below the line" tentang kedudukan program KKBPK (seluruh bidang) di Tk. Prov dan Kabikota	1	Kabikota		
	b. Pengembangan Media "below the line" MHP				
	c. Pengembangan koordinasi kerjasama dengan media massa lokal Tk. Prov dan Kabikota				
	d. Sosialisasi KIE MHP di wilayah sasaran, wilayah khusus dan sasaran khusus				
	e. Sosialisasi dan interaksi informasi/pendayagunaan - Lintas/border/poster/media advokasi below the line tentang seluruh Program (bagi Fasilitas)				
	f. Kegiatan lain yang terkait IKK dan disesuaikan dengan kondisi wilayah				
18.42	Jumlah Penayangan Informasi KKB melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya tradisional			895.000.000	
	842 Penayangan Informasi KKB melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya tradisional				
	a. Pengembangan dan produksi media advokasi KIE KKB yang mencakup seluruh bidang program (meliputi pesan ml, pesan pendukung pesan ml), dan pesan ml				
	b. Media Elektronik (TV dan Radio daerah)				
	c. Media Massa Cetak (Surat Kabar/Majalah/Tabloid daerah)				
	d. Pengembangan/penoncloran media lin bawah (below the line)				
	e. Media Luar Ruang (Billboard/Spanduk)				
	f. Pengembangan KIE berbasis komunitas (contoh: Radio komunitas, Komunitas pedagang pasar, komunitas petani dll)				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		2018	2019		
				147.000.000	
18.43	Jumlah Adyikasi dan KIE program KKBP melalui mupen				
	843 Pelaksanaan Adyikasi dan KIE program KKBP melalui mupen				
	a. Pengembangan dan Reproduksi berbagai materi dan informasi KIE dalam operasional Mupen				
	b. Peningkatan pengetahuan KIE MUPEN		KabKoto		
	c. Peningkatan pengetahuan MUPEN sebagai sarana KIE peningkatan MS.P di Tk. Kab. Kota	3			
	d. Fasilitas peningkatan gerak Mupen KabKoto ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan				
	e. Kegiatan lain yang terkait KK dan dilaksanakan dengan kondisi wilayah				
18.51	Jumlah Penggerakan Pembiayaan KKB bagi mitra kerja di setiap tingkatan wilayah			1.182.000.000	
	851 Dukungan Penggerakan Pembiayaan KKB bagi mitra kerja di setiap tingkatan wilayah				
	a. Pertemuan Lempap SMP Tk. Desa/Kelurahan	428	Desa/Kelurahan		5 x pertemuan penggerakan
	b. Fasilitas penggerakan Program KKBP bagi penyuluhan KB (RKB/PLK/KB/Tim Operasional Tk. Desa/TKRKB)	428	Desa/Kelurahan		5 x pertemuan penggerakan
	c. Pembiayaan KKBP bagi masyarakat dan RW/RT/Kader Tk. Desa	428	RW/RT		5 x pertemuan penggerakan
18.52	Jumlah Pembiayaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat			549.000.000	
	852 Pembiayaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat				
	a. Pertemuan Kemitan Program KKBP tingkat Kecamatan (Rakor Kac)	76	Kec		5 x pertemuan penggerakan
	b. Pertemuan Kemitan Program KKBP tingkat Desa/Kelurahan (Rakor Des)	428	Desa/Kelurahan		5 x pertemuan penggerakan
	c. Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penggerakan mekanisme operasional Lini Lapangan oleh Provinsi	5	KabKoto		
18.61	Persentase keseriusan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBP			540.000.000	
	861 Peningkatan keseriusan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBP				
	a. Peningkatan dukungan dan fasilitas stakeholder dan mitra kerja tingkat Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka pelaksanaan operasional program KKBP di Lini Lapangan	3	Mitra Kerja		
	b. Rapat Koordinasi Tingkat (Rakornas) Kemitan Tk. Provinsi	5	KabKoto		
	c. Sosialisasi penguatan program KKBP meliputi kelembagaan, program, sarana prasarana, dan SDM di Tk. Prov dan Kab/Kota				
	d. Orientasi Hubungan antar lembaga dan Lini Lapangan Tk. Prov				
	e. Pemetaan/pemilihan usulan lands pengformalan dan lands pengharga Program KKBP				
	f. Fasilitas/pemilihan pemetaan lands pengformalan dan lands pengharga Program KKBP bagi unsur sektor pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan stakeholders Tk. Kab/Kota dalam melaksanakan program KKBP Lini Lapangan	5	KabKoto		
	g. Pembentukan jejaring kemitan KKBP (Bupati/Walikota dan DPRD)				
	h. Fasilitas bagi unsur sektor pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kab/kota yang mendapatkan lands informasi dan pengorganisasian				
	i. Pembentukan "Kampung KB" (sisi project) - 1 kampung KB percontohan di setiap Kab/Kota	5	KabKoto		Yaklong KB akan dis-kegiatan dan seluruh bidang launching kampung KB akan dilaksanakan pada 2018
	k. Koncoisasi Program KKBP Lini Lapangan	1	Regional		Pertemuan dgn RKB/PLK/KB masing-masing Regional kabupaten
	l. Kegiatan lain yang terkait KK dan dilaksanakan dengan kondisi wilayah				
18.71	Jumlah penyaluran dana dan informasi program KKBP di provinsi			1.793.167.000	
	871 Peningkatan pengelolaan dana dan informasi program KKBP di				
	a. Pengadaan sarana dan prasarana pencatatan dan pelaporan				
	b. Orientasi bagi petugas RR				
	c. Operasional Pencatatan dan Pelaporan				
	d. Peningkatan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta jenggojengnya baik pemerintah dan swasta yang melakukan pelayanan KB dalam JKN sebagai realisasi Fasilitas				
	e. Monitoring/pengawasan Pencatatan dan Pelaporan				
	f. Pengadaan dan Pelaporan				
	g. Up. doing data base Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta jenggojengnya, serta masalah KB dalam JKN secara nasional				
18.72	Jumlah sistem informasi kependudukan dan keluarga yang dimanfaatkan			527.000.000	
	872 Pengembangan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan dan keluarga				
	a. Osanisasi tool pencatatan dan pelaporan				
	b. Laporan umpan balik dan hasil analisis informasi	40.422	PD		Sesuai pedoman dan Keputusan Adm (Dinas)
	c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Rujukan				
	d. Kegiatan lain yang terkait KK dan dilaksanakan dengan kondisi wilayah				



NO.	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
			2016		
5299.000	Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional KKBPK			3.723.886.000	
5299.000	Pengelolaan Program Pelatihan dan Pengembangan Provinsi			3.723.886.000	
5299.001	Penhiliran dan pelatihan Program KKBPK di provinsi			2.653.970.000	
	5299.001.001 Tanpa Sub Output				
	30.21 Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SOM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional) di seluruh tingkatan wilayah			2.653.970.000	
	021 Pembinaan dan Pengembangan SOM provinsi				
	a Pembinaan SOM Aparatur provinsi				
	- Dekat Pin I	-	Peserta		
	- Dekat Pin II	-	Peserta		
	- Dekat Pin IV	-	Peserta		
	b Peningkatan kapasitas Widyaiswara	7	Peserta		
	c Diklat Jabatan Fungsional	-	Peserta		
	d Peningkatan Kompetensi SOM Labang (Pelatihan Teknis bagi penyelenggara program)	4	Peserta		
	e Akreditasi DKKP				
	f Identifikasi Kebutuhan Diklat				
	g Pengembangan kurikulum, Materi dan Media Pembelajaran				
	h Pengelolaan Data SDPA				
	i Orientasi Program KKBPK bagi Toga/Toma, LSCM, dan Misa Haraj (Diklat Fungsional Dasar bagi PKB (PNS)	15	Peserta		
	j Diklat Teknis Program KKBPK bagi PLKB (Nn PNS)	13	Peserta		
	k Diklat Teknis Program KKBPK bagi PLKB (Nn PNS)	25	Peserta		
	l Diklat Penjurangan PKB Terintegrasi An				
	m Diklat Teknis Program KKBPK bagi Tim KB Desa				
	n Refreshing PLKB/PKB (PNS dan Nn PNS)	128	Peserta		
	o Pelatihan Teknis Pembinaan Program KKBPK bagi PKBDD	20	Peserta		
	p Pelatihan Teknis Advokasi dan KR bagi Pengelola Program KKBPK		Peserta		
	q Pelatihan Teknis Komunikasi Perubahan Perilaku (BCC) bagi mitra kerja	20	Peserta		
	r Pelatihan KIRK dengan ARPK bagi Bidan				
	s Pelatihan Medis Teroris CTU (IUD dan Implant) bagi Bidan	87	Peserta		
	t Pelatihan Medis Teroris CTU (IUD dan Implant) bagi Dokter	47	Peserta		
	u Pelatihan Teknis Vasektomi (MOP) bagi Tim Dokter	12	Peserta		
	v Pelatihan Teknis Tubektomi (MDA) bagi Tim Dokter	12	Peserta		
	w Pelatihan pengelola gudang aborsi stokroom				
	x Kegiatan pengembangan Center of Excellence (CoE) to Comprehensive Family Planning Training				TA 2016 fokus pengembang di LGD, LGY
	y Pengembangan kegiatan training (magang) pelatihan manajerial bagi peserta luar negeri				TA 2016 fokus pengembang di Jawa, Sunda, Bali NTB dan Babel
5299.002	Penelitian dan pengembangan Program KKBPK di provinsi			1.099.905.000	
	5299.002.002 Tanpa Sub Output				
	30.31 Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKP) yang dimanfaatkan			1.099.905.000	
	031 Pemantauan hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKP)				
	a Pelaksanaan penelitian dan pengembangan KKBPK				
	b Pengembangan model-model pengembangan program KKBPK				
	c Survei Indikator RPJMN				sesuai Pedoman dan Rukn
	d Survei Kepuasan, KR dan KR di kalangan remaja				
5297.000	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKBPK			17.111.814.000	
5297.000	Pengelolaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di provinsi			17.111.814.000	
5297.001	Dukungan manajemen pengelolaan Program KKBPK di provinsi			17.111.814.000	
	5297.001.001 Tanpa Sub Output				
	23.43 Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BWH, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)			2.000.000.000	
	343 Peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran program KKBPK yang mengacu pada pendekatan kerangka penganggaran jangka panjang, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja				
	a Sosialisasi pengembangan kepegawaian dan strategi Perencanaan Program dan Anggaran				
	b Sosialisasi Perencanaan Program dan Kegiatan Prioritas dengan Bupati (Provinsi dan Kabupaten) - Fasilitas Mulyanegara Prov	3	Manusia		
	c Dukui penyusunan pengembangan data base untuk perencanaan program dan anggaran Provinsi dan Kabupaten				
	d Dukui Struktur Program dan Anggaran sesuai dengan Rencana Kerja (RKPD) Kabupaten				
	e Konsolidasi Perencanaan program KKBPK Pusat dan Provinsi (KOREN II)				
	f Konsolidasi Perencanaan program KKBPK Pusat dan Provinsi (KOREN II)				
	g Korenisi				
	h Fasilitas komunikasi perencanaan Program dan Anggaran				
	i Penguatan Tim OAK Ta. Provinsi				
	j Kegiatan lain yang terkait KK dan disesuaikan dengan kondisi wilayah				
	344 Peningkatan kualitas kompetensi pegawai				
	a Pelaksanaan pembinaan kepegawaian				
	b Inventarisasi PKB/PKB	5	Manusia		
	c Fasilitas Pelayanan SK (Mutasi, SKKP, PAI, SK Jabatan fungsional, Kartu Taspun, Baperkasum, LHKRN)				
	d Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian				
	e Pengelolaan arsip dan Dokumentasi Pegawai Provinsi				
	f Penyusunan dan evaluasi SKP				
	g Sosialisasi dan internalisasi budaya kerja				
	h Penyelesaian kasus ASN				
	i Pengadaan pegawai ASN				
	j Motivasi Calon Purnakarya				
	k Analisa beban kerja				
	l Kegiatan lain yang terkait IKK dan disesuaikan dengan kondisi wilayah				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
			2014		
	345 Pengelolaan keuangan dan barang milik negara yang akurat, kredibel dan memenuhi standar kepatutan				
	a. Rekrutasi Laporan Keuangan dan BMN dengan KPRN, dan KPRN				
	b. Validasi data laporan keuangan dan BMN				
	c. Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)				
	d. Analisa data Laporan Keuangan dan BMN				
	e. Identifikasi dan Pemertuaan Pelaksanaan Pembetulan Bendahara				
	f. Analisa/evaluasi DIPA dan RPAK, (analisa Revisi dan Realisasi)				
	g. Pengelolaan Gudang Akon				
	h. Distribusi Akon ke Kab/Kota	5	Kab/Kota		
	i. Monitoring OAK Kab/Kota				
	j. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan				
	k. Evaluasi Tindak lanjut penyelesaian kasus Turutan Ganti Rugi Turutan Perencanaan (TGR/TP)				
	l. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan BMN				
	m. Penyusunan rencana kebutuhan BMN (RK BMN)				
	n. Stock opname akon provinsi				
	o. Penyusunan LAKP Provinsi				
	p. Kegiatan lain yang terkait RK dan disesuaikan dengan kondisi wilayah				
	346 Peningkatan pelaksanaan NSPK dan pengelolaan organisasi dan tata laksana				
	a. Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan dan tata laksana terkait Bidang Pengendalian Penduduk dan KB				
	b. Sosialisasi NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan KB				
	c. Fasilitas Bimbingan Teknis Pelaksanaan NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten/Kota				
	d. Fasilitas Kasus Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku				
	e. Pemetaan Usulan Bidang KKBPK di Kabupaten (LU 23 thn 2014)	5	Kab/Kota		
	f. Fasilitas PGD PKB/PLKB (LU 23 thn 2014)	5	Kab/Kota		
	g. Penguatan kemampuan dalam mendukung program KKBPK				
	h. Kegiatan lain yang terkait KB dan disesuaikan dengan kondisi wilayah				
	347 Sarana dan prasarana perkantoran			200.000.000	✓
	a. Pengadaan Sarana Prasarana perkantoran				
	b. Renovasi/Perbaikan/Pembangunan Gedung dan bangunan (bangunan kantor, Gudang, Rumah Dinas, dll)				
	c. Pengadaan Kendaraan Dinas (Roda 2/WB)				
	348 Peningkatan kualitas pelaksanaan program KKBPK provinsi (MDNEV)				
	a. Monitoring dan evaluasi terpadu pelaksanaan program KKBPK (seluruh bidang)	5	Kab/Kota		
	b. Monitoring dan evaluasi terpadu Lini Lapangan				
	c. Fasilitas/koordinasi/konektivitas program KKBPK				
	d. Kegiatan lain yang terkait KB dan disesuaikan dengan kondisi wilayah				
6297.994	Layanan Perkantoran			12.125.200.000	
	6297.994.941 Tanpa Sub Output				
	22.41 Persentase ketepatan Pembayaran gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)			12.125.200.000	✓
	001 Pelaksanaan Pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi				
	a. Pembayaran gaji				
	b. Pembayaran uang makan				
	c. Pembayaran tunjangan kinerja (insentif)				
	Layanan Perkantoran			2.156.414.000	
	6297.994.942 Tanpa Sub Output				
	23.42 Jumlah penyediaan/anggaran operasional dan pemeliharaan perkantoran			2.156.414.000	✓
	002 Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan perkantoran				
	a. Pemeliharaan kendaraan dinas (Roda 2, di dan 6)				
	b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (termasuk mesin-mesin dan instalasi)				
	c. Pemeliharaan gedung/bangunan kantor, gudang, rumah dinas, halaman kantor				
	d. Pemeliharaan listrik				
	e. Outsourcing (selain cleaning service peranggung jawab puting akon, dll)				
	f. Pengadaan data dan jasa				
	g. Kebutuhan standisasi ATK perkantoran				
	h. Fasilitas komputerisasi				
6298.000	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur RKORN			109.500.000	
6298.001	Pengelolaan program pengawasan provinsi			109.500.000	
6298.001	Tercapainya akuntabilitas dan pelaksanaan pengawasan di provinsi			109.500.000	
	6298.001.001 Tanpa Sub Output				
	20.21 Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK			109.500.000	
	621 Peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya				
	a. Pelaksanaan SPK				
	b. Uji Petik pelaksanaan program KKBPK Kab/Kota				
	c. Fasilitas Pemerkahan Khusus				
	d. Konsultasi Pengawasan				
	e. Evaluasi Pengawasan				
	f. Sosialisasi Penerapan ZI WBK / Pameran Anti Korupsi				
	g. Koordinasi dengan mitra kerja pengawasan eksternal				
	h. Evaluasi ZI WBK				
	i. Peningkatan kompetensi ARP melalui program pengawasan				
	j. Sosialisasi MPPRB				
	k. Review RPAK				
	l. Review RK BMN				
	m. Kegiatan lain yang terkait RK dan disesuaikan dengan kondisi wilayah				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		2016		
	STANDARISASI OUTPUT *)			
	904 Layanan Perkantoran			
	941 Tanpa Sub output			
	901 Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
	942 Tanpa Sub output			
	902 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran			
	906 Kendaraan Bermotor			
	901 Tanpa Sub output			
	941 Kendaraan bermotor			
	- Kendaraan Roda 2/4/7			
	906 Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi			
	901 Peningkatan Kualitas Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi			
	811 Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi: Barang			
	- Laptop/Computer/PC			
	- Printer/Scanner/CD/DVD/telex			
	907 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			
	811 Peningkatan Kualitas Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			
	711 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran: Barang Sekunder			
	- Meubelair/lemari/Brankas/Branas			
	- AC/Genset/td			
	908 Gedung dan Bangunan			
	901 Pembangunan/Rehab Gedung/Bangunan Kantor			
	811 Pembangunan Gedung			
	- Gedung Kantor/Rumah Dinas/Daerah/Dinas/Asrama			
	812 Rehab Gedung/Gudang Kantor/ Balai Diklat			
	813 Pembangunan sarana lainnya			
	- Taman/Garis/Tempel/Pasar/Pasar/Pasar/Pasar			




[Dashboard](#) | [Email Data](#) | [Monitoring](#) | [Ubah Password](#)

008.01.017972 - PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL D.I. YOGYAKARTA

Download

 Urut berdasarkan : [Output](#) | [Realisasi output tertinggi](#) | [Realisasi output terendah](#) | [% realisasi output tertinggi](#) | [% realisasi output terendah](#) | [Progres bernilai](#) | [Progres terendah](#)

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Output	Anggaran			Output				Keterangan
			Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	% Realisasi (%)	Target (volume)	Total Realisasi (volume)	Total Realisasi (%)	Total Progres (%)	
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	5297 Pengelolaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Provinsi	5297.001 Dukungan manajemen pengelolaan Program KKBPK di Provinsi (Jayanan)	2.171.545.000	1.518.940.854	69,95	5,00	5,00	100,00	100,00	
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	5297 Pengelolaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Provinsi	5297.994 Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)	14.294.859.000	14.243.049.149	99,62	12,00	12,00	100,00	100,00	
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	5297 Pengelolaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Provinsi	5297.995 Kendaraan Bermotor (Unit)	205.000.000	204.925.000	99,96	1,00	1,00	100,00	100,00	
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	5297 Pengelolaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Provinsi	5297.996 Peningkat Pangoah Data dan Komunikasi (Unit)	29.400.000	29.396.975	99,99	1,00	1,00	100,00	100,00	
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	5297 Pengelolaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Provinsi	5297.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (Unit)	49.000.000	48.938.500	99,87	1,00	1,00	100,00	100,00	
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	5297 Pengelolaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Provinsi	5297.998 Gedung/Bangunan (M2)	40.000.000	39.841.200	99,60	55,00	55,00	100,00	100,00	
03 Program Pengawasan dan Pemngkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	5298 Pengelolaan Program Pengawasan Provinsi	5298.001 Pengawasan intern yang efektif efisien terhadap pengelolaan program KKBPK (LHP)	94.401.000	61.281.125	64,92	1,00	1,00	100,00	98,00	
04 Program Pelatihan, penialian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	5299 Pengelolaan Program Pelatihan dan Pengembangan Provinsi	5299.001 Pendidikan dan pelatihan Program KKBPK di provinsi (orang)	2.334.501.000	760.746.439	32,59	401,00	196,00	42,62	84,12	
04 Program Pelatihan, penialian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	5299 Pengelolaan Program Pelatihan dan Pengembangan Provinsi	5299.002 Penelitian dan pengembangan Program KKBPK di provinsi (Hasil Penelitian)	942.527.000	704.100.350	74,70	1,00	1,00	100,00	100,00	
06 Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	3331 Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi	3331.075 Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk (Wilyah)	1.285.900.000	1.005.044.953	78,16	5,00	5,00	100,00	92,50	

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Output	Anggaran			Output				Keterangan
			Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	% Realisasi (%)	Target (volume)	Total Realisasi (volume)	Total Realisasi (%)	Total Progres (%)	
06 Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	3331 Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi	3331.076 Keserikan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan (Peserta KB)	7.300.900.000	3.299.294.330	45,19	26.000,00	18.944,00	72,84	72,84	
06 Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	3331 Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi	3331.077 Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh lingkungan wilayah (Wiyah)	3.017.750.000	2.141.893.520	70,98	5,00	4,89	97,80	97,80	
06 Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	3331 Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi	3331.078 Penggerakan stakeholder, mitra kerja, serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat, berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam Program KBSPK (Wiyah)	4.550.929.000	2.488.976.875	54,69	5,00	4,81	92,20	90,00	
<b>Total</b>			<b>36.916.862.000</b>	<b>26.544.399.276</b>	<b>71,90</b>	<b>26.633,00</b>	<b>19.231,58</b>	<b>72,21</b>	<b>95,24</b>	

Hal ini bisa juga dapat menghubungi :  
 email : [info@kemonev.go.id](mailto:info@kemonev.go.id)  
 telp : 021 - 34 28 7330

Copyright © 2011 Kementerian Keuangan RI - OJA






PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Triwulan IV Tahun Anggaran 2016

Kode dan Nama Kementerian / Lembaga	[068] BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Kode dan Nama Unit Organisasi	[068.01] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kode dan Nama Satuan Kerja	[017972] PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL D.I. YOGYAKARTA
Kode dan Nama Program	[068.01.06] Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Kode dan Nama Kegiatan	[3331] Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi

No	Kode dan Nama Output	Kategori Output	Keuangan (Rp.)				Fisik (%)		
			Pagu	Target	Realisasi	Status	Target	Realisasi	Status
1	[3331.001] Rancangan induk pengendalian penduduk di Provinsi	Bel. Barang RM	1.032.213.000	1.032.213.000	1.006.044.953		100,00	92,50	
2	[3331.002] Kesertaan ber-KB di Provinsi	Bel. Barang RM	4.847.200.000	4.847.200.000	3.299.294.330		100,00	72,54	
3	[3331.004] Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Provinsi	Bel. Barang RM	2.149.595.000	2.149.595.000	2.141.863.525		100,00	97,80	
4	[3331.004] Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Provinsi	Bel. Modal RM	0	0	0		0,00	0,00	
5	[3331.005] Advokasi dan Penggerakan di Provinsi	Bel. Barang RM	700.095.000	700.095.000	642.820.400		100,00	92,00	
6	[3331.006] Kerjasama dengan mitra kerja	Bel. Barang RM	1.042.554.000	1.042.554.000	1.031.073.144		100,00	98,00	

No	Kode dan Nama Output	Kategori Output	Keuangan (Rp.)				Fisik (%)		
			Pagu	Target	Realisasi	Status	Target	Realisasi	Status
7	[3331.007] Pengelolaan data dan informasi pembangunan KKB di Provinsi	Bel. Barang RM	912.290.000	912.290.000	813.083.331		100,00	89,00	
8	[3331.008] SDM yang terdidik dan terlatih di Provinsi	Bel. Barang RM	774.874.000	774.874.000	760.746.439		100,00	84,12	
9	[3331.009] Penelitian Kependudukan dan KB di Provinsi	Bel. Barang RM	720.277.000	720.277.000	704.100.350		100,00	100,00	
10	[3331.010] Dokumen perencanaan program KKB di provinsi	Bel. Barang RM	585.115.000	585.115.000	567.673.688		100,00	100,00	
11	[3331.012] Monitoring, Evaluasi dan pembinaan pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB di Provinsi	Bel. Barang RM	1.025.122.000	1.025.122.000	951.267.166		100,00	100,00	
12	[3331.994] Layanan Perkantoran	Bel. Pegawai RM	12.785.445.000	12.785.445.000	12.353.756.354		100,00	100,00	
13	[3331.994] Layanan Perkantoran	Bel. Barang RM	1.915.569.000	1.915.569.000	1.889.252.795		100,00	100,00	
14	[3331.997] Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Bel. Modal RM	49.000.000	49.000.000	48.938.600		100,00	100,00	
15	[3331.997] Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Bel. Barang RM	0	0	0		0,00	0,00	
16	[3331.999] Output Cadangan	Bel. Barang RM	0	0	0		0,00	0,00	
17	[5297.995] Kendaraan Bermotor	Bel. Modal RM	205.000.000	205.000.000	204.925.000		100,00	100,00	
18	[5297.996]	Bel. Modal RM	29.400.000	29.400.000	29.396.975		100,00	100,00	
19	[5298.001] Terwujudnya akuntabilitas dan pelaksanaan pengawasan di provinsi	Bel. Barang RM	71.809.000	71.809.000	61.281.125		100,00	85,00	

No	Kode dan Nama Output	Kategori Output	Keuangan (Rp.)				Fisik (%)		
			Pagu	Target	Realisasi	Status	Target	Realisasi	Status
20	[5630.998] Gedung/Bangunan	Bel. Modal RM	40.000.000	40.000.000	39.841.200		100,00	100,00	
21	[5630.998] Gedung/Bangunan	Bel. Barang RM	0	0	0		0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>26.888.358.000</b>	<b>26.888.358.000</b>	<b>26.544.399.276</b>		<b>100,00</b>	<b>93,93</b>	

Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

, 9 Maret 2017